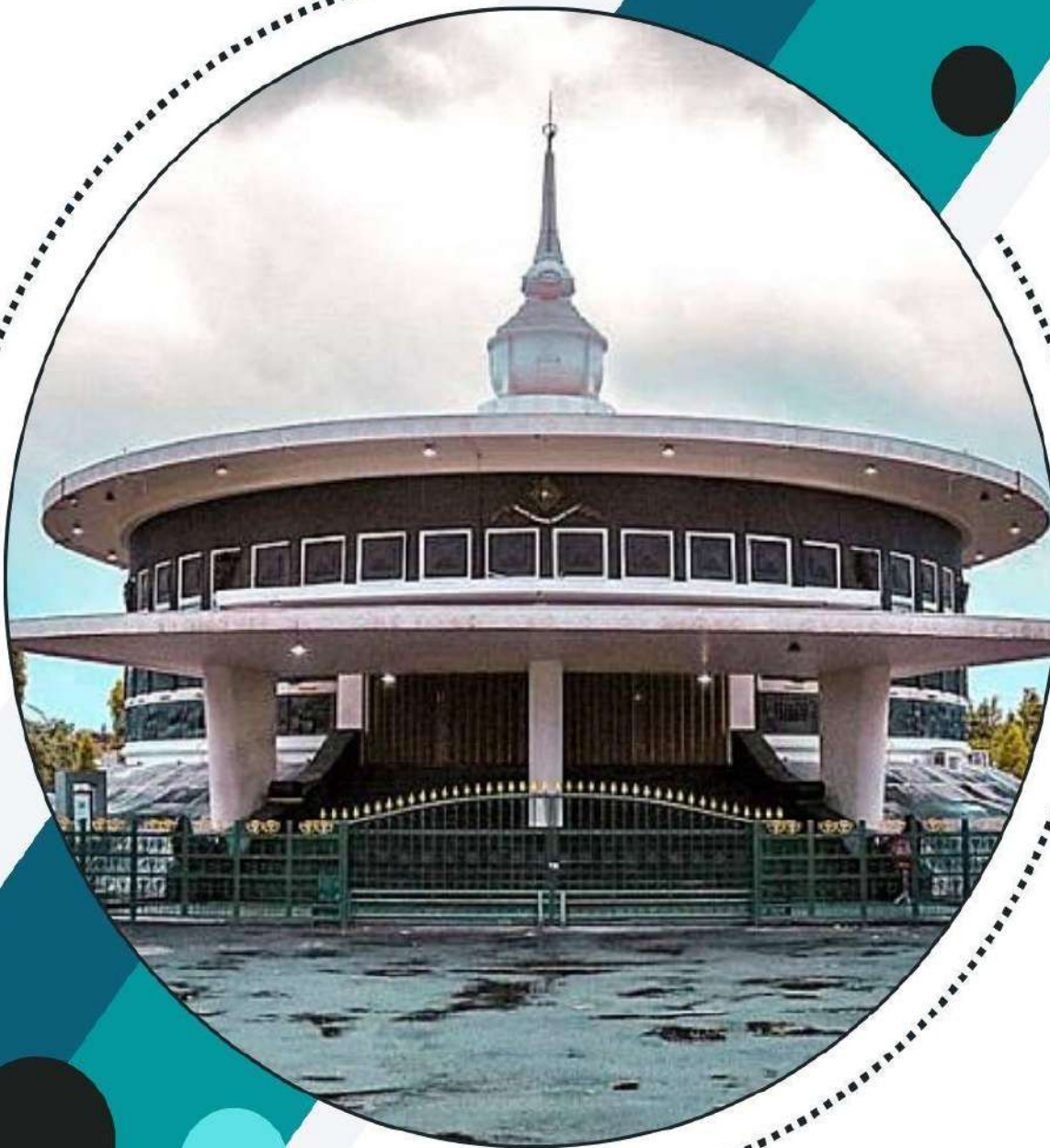


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023



KEMANTREN MERGANGSAN

Jl. Sisingamangaraja no. 55 Yogyakarta Kode Pos : 55153
Telp/Fax : (0274) 388943 Email: mg@jogjakota.go.id
Email Intranet : HYPERLINK "mailto:intra.mg@jogjakota.go.id"
intra.mg@jogjakota.go.id
Website : mergangsankec.jogjakota.go.id

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah senantiasa Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta telah dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kemantren Mergangsan Tahun 2023.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) Kemantren Mergangsan Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKIP Kemantren Mergangsan Tahun 2023 merupakan bentuk Akuntabilitas Publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Mergangsan Tahun 2023 ini berisi tentang Komitmen Pencapaian Kinerja Kemantren Mergangsan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan terhadap Sasaran Strategis Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

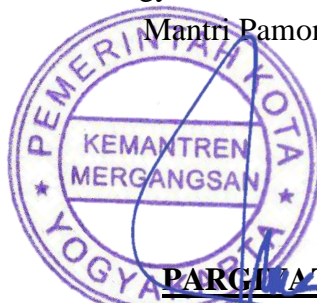
Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Mergangsan ini masih belum sempurna, untuk itu saran kritik masukan dalam rangka perbaikan sangat dibutuhkan. Saran masukan kritik akan menjadi bahan masukan dalam memperbaiki Pencapaian Kinerja Kemantren Mergangsan di masa mendatang.

Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Mergangsan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun bahan untuk melakukan evaluasi kepada Instansi Kemantren Mergangsan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 31 Januari 2024

Mantri Pamong Praja



PARGIAT, SIP

NIP. 197305241992031002

Executive Summary



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kemantren Mergangsan Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kemantren Mergangsan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kemantren Mergangsan Tahun 2023-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Kemantren Mergangsan yang dihasilkan di tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat dengan indikatornya: Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan Capaian Kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 tercapai 400,33 atau (100,01%) dari target yang ditetapkan
- b. Sasaran 2: Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Mergangsan dengan indikatornya :
 1. Indeks Survey Kepuasan Masyarakat yang meningkat dengan capaian kinerja pada tahun 2023 tercapai nilai SKM : 86 dari target yang ditetapkan yakni 85,5.
 2. Persentase Swadaya masyarakat dengan capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 105,17 % dari target yang ditetapkan Rp. 1.591.231.000,-.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Kemantren Mergangsan juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan Program dan Kegiatan beserta Capaian Kinerja Belanja Keuangan tahun 2023.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kemantren Mergangsan ke depan, sebagai berikut:

1. Penyesuaian dan atau Peninjauan Target dan Sasaran Program Kegiatan PD dalam rangka Penanganan Pandemi Covid 19 dan Recovery Pemulihan Ekonomi pada Tahun 2023.
2. Pelibatan masyarakat dalam pendampingan dan Pengawasan dalam tahapan Musrenbang dan Pelaksanaan Dana Kelurahan tahun 2023 guna meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah di hadapan masyarakat.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kemantren Mergangsan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Executive Summary	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	ix
BAB I Pendahuluan	10
A. Latar belakang	10
B. Maksud dan Tujuan	12
C. Gambaran Umum Kemantren Mergangsan	13
D. Kedudukan Organisasi	17
E. Tugas Pokok dan Fungsi	17
F. Pelimpahan Kewenangan	19
G. Uraian Ketugasan	24
H. Struktur Organisasi	25
I. Isu-isu Strategis Organisasi	26
J. Sumber Daya Manusia / Kepegawaian	28
K. Sarana dan Pra Sarana Kerja	30
L. Keuangan dan Anggaran	33
M. Prestasi, Penghargaan dan Inovasi	41
N. Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	47
BAB II Perencanaan Kinerja	51
A. Perencanaan Sasaran Strategis	51
A.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	52
A.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	55
A.3 Strategi, Arah kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	57
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	60
C. Rencana Anggaran Tahun 2023	67
BAB III Akuntabilitas Kinerja	71
A. Capaian Kinerja	71

A.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023 (Sasaran).....	71
A.2	Capaian Kinerja Program Utama Tahun 2023 (Strategi).....	74
A.3	Capaian Kinerja Kegiatan utama Tahun 2023 (Arah Kebijakan)	75
A.4	Capaian Kinerja Tahun 2023 (Program dan Kegiatan Pendukung).....	77
B.	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	86
B. 1	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis (Sasaran)	87
B. 2	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Program Strategis.....	90
B. 3	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Kegiatan Strategis (Arah Kebijakan) ...	92
C.	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya (Program dan Kegiatan Pendukung) ..	95
D.	Realisasi Anggaran Tahun 2023	103
E.	Inovasi.....	113
F.	Kolaborasi Lintas Sektor.....	114
BAB IV Penutup.....		116
LAMPIRAN.....		118

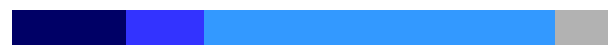
Daftar Tabel

Tabel 1 Kelurahan di Wilayah Kemantren Mergangsan.....	13
Tabel 2 Luas Kemantren Mergangsan Menurut Kelurahan (KM2).....	15
Tabel 3 Jenis - jenis Urusan dalam Pelimpahan Wewenang dari Walikota kepada Mantri Pamong Praja	19
Tabel 4 Jenis - jenis Bidang dalam Pelimpahan Wewenang dari Walikota kepada Mantri Pamong Praja	22
Tabel 5 Uraian Rincian Ketugasan Mantri Pamong Praja Mergangsan	24
Tabel 6 Pegawai dan Karyawan Kemantren Mergangsan berdasarkan jenis jabatan, jenis kelamin dan golongan ruang.....	28
Tabel 7 Pegawai berdasarkan Diklat Struktural / penjenjangan bagi pejabat struktural Kemantren Mergangsan.....	29
Tabel 8 Pegawai dan Karyawan Kemantren Mergangsan berdasarkan tingkat pendidikan	29
Tabel 9 Pejabat Struktural Kemantren Mergangsan berdasarkan Jabatan Eselonisasi	29
Tabel 10 Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana Utama Kemantren Mergangsan.....	30
Tabel 11 Daftar Tujuan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 Perangkat Daerah : Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta	33
Tabel 12 Sasaran Program dan Target Tahunan Hasil Reviu Renstra Kemantren Mergangsan ..	51
Tabel 13 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Yogyakarta 2023-2026.....	53
Tabel 14 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis serta target capaian dalam Renstra (Jangka Menengah 2023-2026) Kemantren Mergangsan.....	56
Tabel 15 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 untuk Kemantren Mergangsan.....	57
Tabel 16 Strategi dan indikator keberhasilan serta target capaian dalam RPD Kota Yogyakarta untuk Kemantren Mergangsan.....	58
Tabel 17 Perjanjian Kinerja terkait Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2023 (APBD Murni).....	60
Tabel 18 Perjanjian Kinerja terkait Program dan Kegiatan Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2023 (APBD Murni).....	61
Tabel 19 Perjanjian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2023 (APBD Murni)	61
Tabel 20 Perjanjian Kinerja terkait Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2023 (APBD Perubahan).....	62
Tabel 21 Perubahan Perjanjian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2023.....	62
Tabel 22 Perubahan Perjanjian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2023.....	63
Tabel 23 Target Belanja Kemantren Mergangsan APBD Murni Tahun 2023	68
Tabel 24 Target Pendapatan Kemantren Mergangsan APBD Murni Tahun 2023	68

Tabel 25 Target Belanja Kemantren Mergangsan APBD Perubahan Tahun 2023	68
Tabel 26 Target Pendapatan Kemantren Mergangsan APBD Perubahan Tahun 2023	68
Tabel 27 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis Utama dan Pendukung	69
Tabel 28 Target Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2023 (RPD Kota Yogyakarta untuk Kemantren Mergangsan Tahun 2023 - 2026)	71
Tabel 29 Perjanjian Kinerja terkait Program dan Kegiatan Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2023	72
Tabel 30 Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023	72
Tabel 31 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2023	73
Tabel 32 Target Program Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2023 (Renstra Kemantren Mergangsan Tahun 2023 - 2026)	74
Tabel 33 Capaian Kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2023	75
Tabel 34 Target Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2023 (Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)	76
Tabel 35 Capaian Kinerja Kegiatan Utama per Program Kemantren Mergangsan Tahun 2023 ..	76
Tabel 36 Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Kemantren Mergangsan Tahun 2023	77
Tabel 37 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Kemantren Mergangsan Tahun 2023	82
Tabel 38 Skala Nilai Peringkat Kinerja dalam Pengukuran Kinerja Perangkat daerah	86
Tabel 39 Target Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2023	87
Tabel 40 Hasil Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan Tingkat Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023	88
Tabel 41 Capain Kinerja Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2023	88
Tabel 42 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan tahun 2023-2026	88
Tabel 43 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2023 terhadap Tahap Akhir Renstra	88
Tabel 44 Target Program Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2023 (APBD Perubahan Kemantren Mergangsan Tahun 2023)	90
Tabel 45 Capaian Kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2023	90
Tabel 46 Capaian Kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2023-2026	90
Tabel 47 Target dan Realisasi Kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2023 terhadap tahun lalu dan Akhir Renstra/RPD	91
Tabel 48 Target Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2023 (Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)	92
Tabel 49 Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2023 (Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)	92

Tabel 50 Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Kemantren Mergangsan Tahun 2023 (Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan).....	95
Tabel 51 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Kemantren Mergangsan Tahun 2023 (Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)	99
Tabel 52 Target Belanja Kemantren Mergangsan APBD Murni Tahun 2023	103
Tabel 53 Target Belanja Kemantren Mergangsan APBD Murni Tahun 2023 berdasarkan Program Kegiatan	103
Tabel 54 Target Pendapatan Kemantren Mergangsan APBD Murni Tahun 2023	104
Tabel 55 Target Belanja Kemantren Mergangsan APBD Perubahan Tahun 2023	104
Tabel 56 Target Belanja Kemantren Mergangsan APBD Perubahan Tahun 2023 berdasarkan Program Kegiatan	104
Tabel 57 Anggaran Perubahan Tahun 2023.....	105
Tabel 58 Komposisi dan Persentase Target Belanja Langsung Kemantren Mergangsan APBD Perubahan Tahun 2023 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Utama dan Sasaran Pendukung	105
Tabel 59 Capaian Kinerja Kegiatan Utama per Program Kemantren Mergangsan Tahun 2023 (Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan).....	106
Tabel 60 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Kemantren Mergangsan Tahun 2023 (Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan).....	107
Tabel 61 Rencana Belanja dan Realisasi Belanja Kemantren Mergangsan pada tahun 2023	110
Tabel 62 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023.....	111
Tabel 63 Analisis efisiensi	112

Daftar Gambar



Gambar 1 Struktur dan Tata Kerja Organisasi Kemantren Mergangsan	26
Gambar 2 Penghargaan Anugerah Inovasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta kategori OPD Terinovatif.....	41
Gambar 3 Penghargaan Anugerah Inovasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta kategori Inovasi Terbaik	41
Gambar 4 Sertifikat Penghargaan Lomba Pameran Living Museum Bertajuk “Babad Siti Kemantren”	42
Gambar 5 Pemberian Penghargaan bagi Penggiat Lingkungan di Kelurahan Wirogunan	43
Gambar 6 Sertifikat Juara Harapan 2 Kampung Wisata Terbaik Tingkat Kota Yogyakarta.....	45
Gambar 7 QRIS Pembayaran Makam Sasanalaya Kemantren Mergangsan	45
Gambar 8 Nomor Register Makam Sasanalaya Kemantren Mergangsan	46
Gambar 9 WEB MISS JUM PADOS DUIT WUTAH"	46
Gambar 10 Penggunaan QRIS untuk pembayaran Retribusi Makam Sasanalaya.....	113
Gambar 11 stiker Nomor Register Makam Sasanalaya pada batu nisan di Makam Sasanalaya	113
Gambar 12 Inovasi MISS JUM PaDos DUIT WuTah.....	114
Gambar 13 Web MISS JUM PaDos DUIT WuTah.....	114
Gambar 14 Contoh Stiker pada Makam.....	115

BAB I Pendahuluan

A. Latar belakang

Bab I memuat :

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum Kedudukan Organisasi
- D. Tugas Pokok Fungsi
- E. Pelimpahan Kewenangan
- F. Uraian Ketugasan
- G. Struktur Organisasi
- H. Isu Strategis Organisasi
- I. SDM Kepegawaian
- J. Sarana dan Prasarana Kerja
- K. Keuangan dan Anggaran
- L. Prestasi, Penghargaan dan Inovasi
- M. Sistematika LKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Mergangsan Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kemantren Mergangsan ini disusun sebagai media dan sarana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Kemantren Mergangsan guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Mergangsan tahun 2023 ini secara garis besar memuat perencanaan kinerja dan pencapaian kinerja selama tahun 2023. Adapun Landasan hukum penyusunan LKIP Kemantren Mergangsan Ini mendasarkan pada berbagai regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 19 Oktober 2023;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2023 – 2026;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 21 Februari 2023;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 15 Mei 2023;

19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 28 Juli 2023;
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 25 Oktober 2023;
21. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 350 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
22. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.12.0000/001/2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta tertanggal 2 Januari 2023;
23. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Nomor DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.12.0000/001/2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta tertanggal 19 Oktober 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kemantren Mergangsan ini juga disusun berdasarkan pada beberapa dokumen-dokumen antara lain Rencana Kerja Kemantren Mergangsan tahun 2023, Dokumen Revisi / Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Mergangsan Tahun 2023 merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja Rencana Kerja Kemantren Mergangsan Tahun 2023, Laporan Pelaksanaan Dokumen Revisi / Perubahan Perjanjian Kinerja dan Perubahan Kinerja Strategis Tahun 2023 yang merupakan Pelaksanaan Kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2023 – 2026, dimana semua dokumen tersebut mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2023 – 2026.

Dokumen Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 adalah turunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2023 – 2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD.

Renstra OPD dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD yang mengacu pada Kebijakan Anggaran Umum (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Maksud penyusunan LKIP Kemantren Mergangsan adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, akuntabel. Selain itu juga sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian target sasaran selama Tahun Anggaran 2023 yang dapat terlihat dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Mergangsan tahun 2023 antara lain :

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi Kinerja Kemantren Mergangsan tahun 2023.
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kemantren Mergangsan.
3. Mendorong Kemantren Mergangsan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kemantren Mergangsan untuk meningkatkan kinerjanya.
5. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kemantren Mergangsan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. Gambaran Umum Kemantren Mergangsan

Kemantren Mergangsan, adalah salah satu dari 14 Kemantren yang ada di Kota Yogyakarta, yang berada pada bagian selatan Kota Yogyakarta dengan keluasan 2.317 km², terdiri dari 3 kelurahan yakni:

Tabel 1 Kelurahan di Wilayah Kemantren Mergangsan

NAMA KELURAHAN	NAMA KAMPUNG	JUMLAH KAMPUNG	JUMLAH RW	JUMLAH RT
Keparakan	1. Dipowinatan 2. Pujokusuman 3. Keparakan Lor 4. Keparan Kidul	4	13	58

Wirogunan	1. Bintaran 2. Surokarsan 3. Wirogunan 4. Joyonegaran 5. Mergangsan Lor 6. Nyutran 7. Mergangsan Kidul	7	24	77
Brontokusuman	1. Timuran 2. Brontokusuman 3. Prawirotaman 4. Karangkajen 5. Karanganyar 6. Lowanu	6	23	84
	JUMLAH	17	60	219

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa di Kemantren Mergangsan ada 3 kelurahan, 17 Kampung, 60 Rukun Warga (RW) dan 219 Rukun Tetangga (RT).

Kemantren Mergangsan termasuk wilayah kota yang berada di sisi selatan dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kemantren Pakulaman
- Sebelah timur laut : Kemantren Umbulharjo
- Sebelah timur : Bantaran Sungai Code, Kemantren Umbulharjo
- Sebelah tenggara : Kemantren Umbulharjo
- Sebelah selatan : Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul
- Sebelah barat daya : Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul
- Sebelah barat : Kemantren Mantrijeron, Kemantren Kraton
- Sebelah barat laut : Kemantren Gondokusuman

Topografi wilayah sangat beragam dari Kawasan Pengembangan Perkotaan, Kawasan Bisnis, Kawasan Wisata dan Budaya, Kawasan Pendidikan, Kawasan Permukiman Tempat Tinggal, Kawasan Perkantoran, Kawasan Kegiatan Jasa, dan Kawasan Permukiman di Bantaran Sungai.

Tabel 2 Luas Kemantren Mergangsan Menurut Kelurahan (KM2)

Nama Kelurahan	Luas (km2)	Persentase (%)
Keparakan	0.53	22.94
Wirogunan	0.85	36.80
Brontokusuman	0.93	40.26
Jumlah	2.31	100

Demografi atau data kependudukan di Kemantren Mergangsan pada akhir bulan Desember 2023 berjumlah 31.542 jiwa, terdiri dari laki-laki 15.177 orang dan perempuan 16.365 orang, rata-rata jiwa per KK : 3 orang, dengan jumlah pernikahan 218 pasangan, Kelahiran : 311 orang, Kematian : 253 orang, mutasi pindah datang : 530 orang. Tingkat Kepadatan penduduk Kemantren Mergangsan : 13.798,70 jiwa/km2.(Sumber Data Monografi Kemantren Mergangsan dalam angka tahun 2023).

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kemantren Mergangsan antara lain TK Negeri : 1, TK Swasta : 19 buah, SD Negeri : 7 buah, SD Swasta : 5, SMP Swasta : 4, MTs : 1, SMA : 3 buah, dan SMK : 3 buah, Akademi/Perguruan Tinggi : 8 buah.

- a. Jumlah Murid TK Negeri : 32 siswa , Jumlah pendidik 4 orang, Ratio Murid/Guru : 8.
 - b. Jumlah Murid TK Swasta : 691 siswa, Jumlah pendidik 97 orang, Ratio Murid/Guru : 7,12.
 - c. Jumlah Siswa SD Negeri : 1505 siswa , Jumlah pendidik 110 orang, Ratio/Murid Guru : 13,68.
 - d. Jumlah Siswa SD Swasta: 915 siswa , Jumlah pendidik 75 orang, Ratio Murid/Guru : 12,2.
 - e. Jumlah Siswa SMP Swasta: 573 siswa, Jumlah pendidik 61 orang, Ratio /Murid Guru : 9,4.
 - f. Jumlah Siswa MTs : 522 siswa, Jumlah pendidik 44 orang, Ratio Murid/Guru : 11,86.
 - g. Jumlah Siswa SMA : 356 siswa, Jumlah pendidik 53 orang, Ratio Murid/Guru : 6,72.
 - h. Jumlah Siswa SMK : 257 siswa, Jumlah pendidik 47 orang, Ratio Murid/Guru : 5,47.
- (Sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)

Dalam Bidang Keagamaan terdapat sarana Peribadatan yaitu : 1 buah Gereja Katholik, 35 Masjid, 31 Mushola, 1 Vihara dan 5 Gereja Protestan. Jumlah penduduk pemeluk agama Islam : 26.777 orang, Kristen Protestan : 1.883 orang, Kristen katolik : 2.823 orang, Hindu 41 orang, Budha 60 orang. (Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil).

Bidang Sarana Pelayanan Kesehatan terdapat 1 buah Rumah Sakit, 1 buah Puskesmas, 2 buah Poliklinik, dan 30 Praktek dokter, dengan Jumlah Tenaga Medis 6

Dokter Umum, 10 Dokter Spesialis, 14 orang Dokter Gigi, 5 Perawat, 4 Bidan dan 3 Farmasi.(Sumber : Puskesmas Kemantren Mergangsan).

Jumlah Posyandu aktif 38 buah dan Pos pelayanan KB 36 buah. Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) di Kemantren Mergangsan berjumlah 5 buah dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) berjumlah 3 buah. Banyaknya Peserta KB aktif 1932 orang.

Banyaknya Keluarga Pengguna Listrik PLN di Kemantren Mergangsan berjumlah 10.872 KK. Rumah Tangga di 3 Kelurahan di Kemantren Mergangsan semuanya sudah menggunakan sumur dan semuanya telah menggunakan Bahan Bakar Energi Gas.

Keseluruhan jalan Kota di Kemantren Mergangsan telah beraspal dan telah dilalui angkutan umum, baik dengan trayek tetap ataupun tidak bertrayek tetap (ojek).

Sarana Komunikasi yang tersedia adalah 3 buah Kantor Pos dan 1 buah pemancar radio swasta. Jumlah Menara Telepon Seluler (BTS) di Kemantren Mergangsan ada 6 buah.

Di Bidang Pariwisata Kemantren Mergangsan memiliki 3 museum yakni Museum Biologi UGM, Museum Taman Siswa Dewantara Kirti Griya dan Museum Perjuangan. Banyaknya Sarana Akomodasi di Kemantren Mergangsan adalah 57 hotel dan 48 penginapan. Hotel-hotel ini terbagi menjadi 2 yaitu hotel berbintang dan non bintang. Untuk hotel berbintang hanya terdapat 13 hotel sedangkan hotel non bintang terdapat 69 hotel. Total kamar yang dijumlah dari tiap-tiap hotel yaitu 1.893 kamar, sedangkan tempat tidur sebanyak 3.072 unit. Banyaknya Kelompok Kesenian di Kemantren Mergangsan berjumlah 12 kelompok terdiri dari 3 kelompok Paduan Suara, 3 kelompok Orkes Melayu dan 3 Kelompok Band.

Sarana dan Prasarana Olahraga antara lain : lapangan bola voley 15 buah, lapangan basket 7 buah, lapangan tenis lapangan 5 buah, lapangan Bulu tangkis 24 buah. Dalam Bidang Pertanian, Tanaman hortikultura yang diusahakan di Kecamatan Mergangsan meliputi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim, tanaman sayuran dan buah-buahan tahunan, tanamanbiofarmaka, serta tanaman hias. Tanaman biofarmaka yang diusahakan oleh masyarakat Kemantren Mergangsan adalah tanaman jahe. Sedangkan tanaman hias yang banyak diusahakan oleh masyarakat Kemantren Mergangsan adalah anturium.

Di Bidang Perbankan, Koperasi dan Perdagangan, banyaknya Sarana Lembaga Keuangan Bank di Kemantren Mergangsan berjumlah 20 buah terdiri dari 8 buah Bank Umum Pemerintah, 6 buah Bank Umum Swasta, 6 buah Bank Perkreditan Rakyat.Banyaknya Koperasi di Kemantren Mergangsan berjumlah 1 buah yaitu berupa Koperasi Simpan Pinjam. Sarana dan Prasarana Perdagangan di Kemantren Mergangsan terdiri dari Kelompok pertokoan berjumlah 20 buah, pasar dengan bangunan permanen berjumlah 3 buah, minimarket/swalayan berjumlah 17 buah, toko/warung kelontong berjumlah 401 buah, restoran berjumlah 60 buah.

Dari sektor PAD Kemantren Mergangsan tahun 2023 mempunyai Wajib pajak PBB dengan jumlah 7.582 WP, yang telah melakukan pembayaran sejumlah 7.358 WP dengan pemasukan Rp5.870.935.350,-

D. Kedudukan Organisasi

Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Kemantren adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kota dan merupakan Perangkat Daerah. Kedudukan Kemantren Mergangsan adalah sebagai salah satu Unsur Pelaksana Tugas dan salah satu Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah kerja Mantri Pamong Praja Mergangsan yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta, Kemantren Mergangsan dipimpin oleh Mantri Pamong Praja yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

E. Tugas Pokok dan Fungsi

Kemantren Mergangsan mempunyai tugas pokok yaitu mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan tugas pembantuan serta penugasan urusan keistimewaan pada wilayah Kemantren Mergangsan. Sedangkan fungsi Kemantren Mergangsan adalah:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
- b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
- c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
- d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
- e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
- f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
- g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
- h. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;

- i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
- j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
- m. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
- n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
- o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren
- p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
- q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
- r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren;
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Tugas pokok fungsi yang lain Kemantren Mergangsan sebagaimana huruf g tersebut diatas adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Yogyakarta untuk menangani sebagian urusan Pemerintah Daerah.

Mantri Pamong Praja Mergangsan dalam melaksanakan tugas wewenang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk menangani urusan pemerintahan daerah tersebut meliputi aspek :

1. Perizinan dan Rekomendasi;
2. Koordinasi dan Pembinaan;
3. Pengawasan dan Fasilitasi;
4. Penetapan, Mediasi dan Penyelenggaraan;
5. Kewenangan lain.

Kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada poin 5 meliputi :

- a. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- b. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

F. Pelimpahan Kewenangan

Dasar Hukum :

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja.

Pelimpahan wewenang dari Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja Mergangsan tersebut meliputi :

Tabel 3 Jenis - jenis Urusan dalam Pelimpahan Wewenang dari Walikota kepada Mantri Pamong Praja

NO.	URUSAN
1.	Pemerintahan Umum a. Pembinaan dan sosialisasi kebangsaan dan ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kehidupan demokrasi
2.	Pendidikan a. Pembinaan pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat (JBM)
3.	Kesehatan a. Fasilitasi Kesi (Kelurahan Siaga) dalam rangka peningkatan pemberdayaan kesehatan berbasis kewilayahan
4.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Peningkatan dan pemeliharaan jalan yang tidak bernomor ruas dengan konstruksi non aspal b. Perbaikan dan peningkatan jalan inspeksi (Jalan pinggir sungai) c. Pelumpuran, perbaikan plat, dinding dan lantai saluran drainase lingkungan d. Perbaikan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum e. Peningkatan dan Pemeliharaan bangunan Tempat Pemakaman Umum milik PemKot. f. Pemberian Izin Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota yang sudah diserahkan Kemantren. g. Pemberian Izin Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Kota h. Pemungutan Retribusi Pemakaman Umum milik Pemerintah Daerah i. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan yang dibangun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta j. Penanganan, pengawasan dan pelaporan terkait kerusakan Ringan pada Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan k. Perencanaan, pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat

	<ul style="list-style-type: none"> l. Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan Cermin Lingkungan m. Pemberian rekomendasi atau keterangan terhadap permohonan Izin mendirikan bangunan (IMB) n. Sosialisasi peraturan terkait perizinan
5.	<p>Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan ketentraman di tingkat Kemantren. b. Penegakan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum yang bersifat represif non yustisia tingkat Kemantren. c. Pelaksanaan pemberdayaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dalam rangka pengurangan resiko bencana (PRB), ketentraman dan ketertiban umum d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, penanganan tanggap darurat dan pasca bencana tingkat Kemantren. e. Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) f. Pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana g. Pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat tingkat Kemantren.
6.	<p>Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan Bantuan Sosial Pangan b. Pembentukan , koordinasi dan Fasilitasi Pusat kesejahteraan Sosial (Puskesos) kelurahan c. Pembinaan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin tingkat Kemantren.
7.	<p>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan pendampingan pemberdayaan perempuan tingkat Kemantren. b. Pembinaan dan pendampingan perlindungan perempuan dan anak tingkat Kemantren. c. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial tingkat Kemantren. d. Pelaksanaan kerjasama sponsorship dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dengan pihak ketiga dalam rangka kegiatan Masyarakat e. Pengelolaan pengembangan potensi unggulan wilayah tingkat Kemantren sesuai kondisi masing-masing wilayah f. Pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat tingkat Kemantren.
8.	<p>Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/pemukiman b. Pemeliharaan dan Perawatan ringan Ruang terbuka Hijau Publik (RTHP) di lingkungan perumahan/pemukiman

	c. Pembangunan Sumur Peresapan air Hujan (SPAH) di lingkungan perumahan/pemukiman
9.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil a. Melaksanakan tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan tingkat Kemantren.
10.	Kebudayaan a. Penguatan dan pengembangan kesenian tingkat Kemantren.
11.	Perdagangan a. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin penyelenggaraan pondokan b. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin reklame / papan nama Usaha/ profesi menempel pada Bangunan gedung c. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin lokasi pedagang kaki lima dan pembinaan pedagang kaki lima
12.	Pembangunan sarana dan Prasarana kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan a. Melaksanakan kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan b. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan
13.	Pembinaan dan pengawasan a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan Pengadaan, Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan

Ruang lingkup yang diatur dalam Pelimpahan Kewenangan di atas adalah sebagai berikut:

- a. pelayanan perizinan;
- b. pelayanan non perizinan;
- c. pekerjaan umum dan tata ruang; dan
- d. kewenangan lain atau kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan

Tabel 4 Jenis - jenis Bidang dalam Pelimpahan Wewenang dari Walikota kepada Mantri Pamong Praja

NO	BIDANG	JENIS PELIMPAHAN
1	2	3
1	Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penggunaan dan atau Pemakaian Aset Pemerintah Kota 2. Izin Pemakaman di Tempat Pemakaman Umum milik Pem. Daerah 3. Izin reklame/ Papan Nama Usaha / profesi yang menempel pada Bangunan gedung dengan ukuran maksimal 1 m2 4. Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima
2	Non Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 2. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 3. Kelurahan Siaga 4. Bantuan sosial Pangan 5. Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kelurahan 6. Pengurangan Resiko Bencana 7. Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat (JBM) 8. Penguatan Kegiatan Kesenian 9. Tugas pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan 10. Pelatihan Masyarakat 11. Pembinaan pedagang Kaki Lima 12. Kerjasama dengan Pihak Ketiga
3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan konstruksi non aspal 2. Peningkatan dan perbaikan jalan inspeksi dengan rabat beton 3. Pelumpuran perbaikan plat dinding lantai drainase lingk ukuran tipe lebar 50 cm 4. Pemeliharaan MCK umum dan kelengkapannya 5. Peningkatan dan pemeliharaan bangunan Tempat Pemakaman Umum 6. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan 7. Pemeliharaan Balai RW yag berada di tanah Pemerintah Kota 8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Kantor KeMantri Pamong Prajaan dan Kelurahan Non Struktur 9. Pemeliharaan peralatan kantor keMantri Pamong Prajaan dan kelurahan

		<p>10. Pemeliharaan pos ronda yang berada di tanah Pemerintah Kota atau tanah persil dengan surat kerelaan dari pemilik tanah</p> <p>11. Pengadaan Cermin Tikungan</p> <p>12. Perencanaan penentuan titik lokasi pemasangan cermin tikungan</p> <p>13. Pemeliharaan cermin tikungan</p> <p>14. Perencanaan, Pembangunan dan atau pemeliharaan ringan Ruang terbuka Hijau Publik di lingkungan perumahan pemukiman</p> <p>15. Pembangunan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)</p>
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	<p>1. Sarana dan Prasarana lingkungan permukiman</p> <p>2. Sarana dan Prasarana transportasi</p> <p>3. Sarana dan Prasarana kesehatan</p> <p>4. Sarana dan Prasarana pendidikan dan kebudayaan</p>
5	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	<p>A. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan Masyarakat</p> <p>B. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan</p> <p>C. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah</p> <p>D. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan</p> <p>E. Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</p> <p>F. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya</p>

G. Uraian Ketugasan

Uraian Rincian Ketugasan Mantri Pamong Praja Mergangsan Kota Yogyakarta diatur pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Uraian Rincian Ketugasan Mantri Pamong Praja Mergangsan

NO	JABATAN	RINCIAN TUGAS
1	MANTRI PAMONG PRAJA MERGANG SAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana strategis dan rencana kerja Kemantren; 2. mengendalikan, merumuskan segala bentuk pelaporan dalam bidang tugasnya; 3. mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja Kemantren; 4. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Sekretariat, Seksi, dan Kelurahan; 5. membina pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan secara lisan/tertulis guna meningkatkan pelayanan di kec ; 6. merumuskan Juklak dan Juknis penyelenggaraan urusan di keMantri Pamong Prajaan; 7. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kemantren; 8. melaksanakan pembinaan operasional dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di ; 9. mengevaluasi permasalahan dalam kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di keMantri Pamong Prajaan untuk dicarikan pemecahannya baik secara lintas program maupun lintas sektoral dalam rangka peningkatan pelayanan; 10. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum; 11. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 12. melaksanakan pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum perlindungan masy; 13. menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

		<p>14. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat KeMantri Pamong Prajaan;</p> <p>15. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;</p> <p>16. melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;</p> <p>17. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaannya kepada bawahan;</p> <p>18. menyusun dan menyampaikan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KeMantri Pamong Prajaan;</p> <p>19. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;</p> <p>20. melaksanakan pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;</p> <p>21. mengkoordinasikan penyusunan dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Kemantren Mergangsan secara berkala;</p> <p>22. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan</p> <p>23. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.</p>
--	--	---

H. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kemantren Mergangsan sebagaimana diatur pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren Dan Kelurahan terdiri dari :

a. Mantri Pamong Praja

b. Mantri Anom, membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

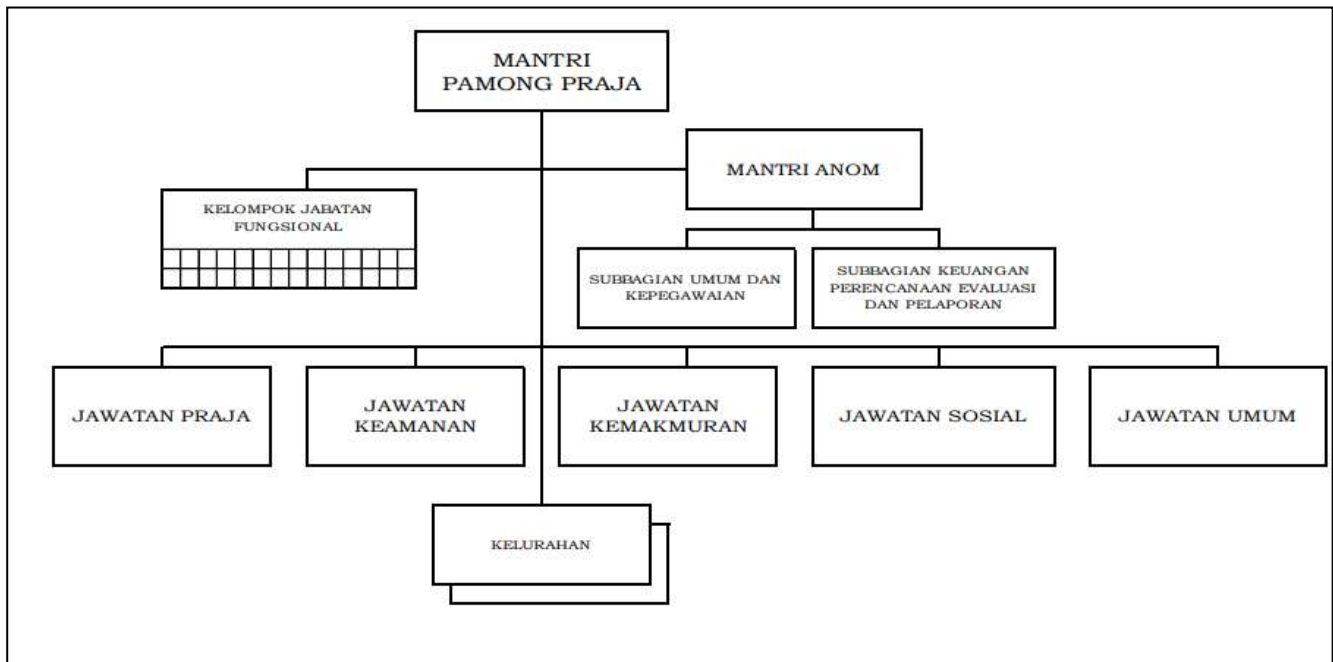
c. Kepala Jawatan Kemantren, terdiri dari :

- Jawatan Praja.
- Jawatan Sosial
- Jawatan Umum
- Jawatan Kemakmuran
- Jawatan Keamanan

d. Kelurahan terdiri dari :

- Lurah
- Sekretaris Lurah
- Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban.
- Kepala Seksi Pembangunan dan Perekonomian
- Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Gambar 1 Struktur dan Tata Kerja Organisasi Kemantren Mergangsan



I. Isu-isu Strategis Organisasi

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Kemantren Mergangsan antara lain sebagai berikut:

1. Status pandemi Covid-19 sudah bergeser menjadi endemi sehingga masyarakat antusias untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan warga di wilayahnya. Tiap wilayah menggalakkan kembali kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti senam bersama, peringatan Hut Kota Yogyakarta, Pentas akhir tahun 2023 di wilayah Kelurahan se Kemantren Mergangsan, ronda dan jimpitan warga, posyandu, pentas seni, kerjabakti di wilayah dan lain sebagainya.
2. Telah terbentuknya Paguyuban Pengurus Kampung se-Kemantren Mergangsan sejumlah 17 Kampung pada tahun 2019 membawa konsekuensi logis terhadap penguatan kapasitas dan kelembagaan dari paguyuban Kampung untuk menjadi mitra Kemantren Mergangsan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kemantren Mergangsan.

3. Dinamika yang terus berkembang berupa keinginan dan kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam usulan Musrenbang Kelurahan serta RPJM kelurahan sebagai implementasi kebutuhan untuk terus meningkatkan perbaikan baik fisik maupun non fisik di wilayahnya masing-masing dalam mewujudkan konsep wilayah, kampung sesuai dengan tematik potensi unggulan masing masing wilayah. Kegiatan masyarakat semakin beragam tersebut memerlukan fasilitasi yang efektif, perlu dilaksanakan Reviu Renstra Kemantren Mergangsan 2023-2026 pada tahun 2024.
4. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam konsep Smart City yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan hal tersebut termasuk membangun jaringan komunikasi terhadap masyarakat agar memanfaatkan secara maksimal fasilitas JSS “ Jogja Smart Service “ dalam pelayanan kepada masyarakat.
5. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik dan tuntutan masyarakat akan pelayanan Prima, diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku termasuk keberadaan ruang pelayanan (PATEN) dan ruang pertemuan yang representatif mendukung Kantor Kemantren Mergangsan Inklusi.
6. Kondisi pembangunan Perkotaan sebagai Lokasi Pariwisata di Kemantren Mergangsan sangat cepat, pertumbuhan penataan kawasan perkotaan(Jalan Taman Siswa dan Jalan Prawirotaman) Sumbu Imajiner, perlunya Penataan sektor Informal PKL, Parkir agar kondisi pembangunan dapat terjaga optimal dalam mendukung kegiatan Pariwisata.
7. Isu Kondisi Lingkungan sebagai dampak pembangunan perkotaan seperti air bersih, sampah, perlu diimbangi dengan penguatan dalam intervensi program seperti SPAH, jumbo Biopori, penghijauan dan lain lain.
8. Tingkat Pembangunan dan swadaya masyarakat Kemantren Mergangsan perlu untuk dipertahankan.
9. Isu Pengentasan Kemiskinan memerlukan adanya program-program berbasis peningkatan perekonomian yang dapat membantu menangani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Kemantren Mergangsan lewat pelatihan pelatihan ekonomi produktif dan diikuti dengan proses pendampingan dan evaluasi dalam implementasi pelatihan yang telah diberikan.
10. Penataan Kawasan Pinggiran dan Bantaran Sungai Code juga perlu adanya pendampingan dan monitoring melalui program KOTAKU yang telah digulirkan.
11. Monitoring dan pengembangan Inovasi Kemantren Mergangsan ke wilayah yang lain terkait Perbaikan RTLH berbasis Komunitas melalui kegiatan Arisan dan Tabungan serta menumbuh kembangkan terciptanya inovasi-inovasi baru di masyarakat.

12. Penguatan program dan kegiatan terkait Dana Pembangunan Kelurahan, agar dapat selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dan dokumen Perencanaan yang lain melalui komunikasi yang intensif Pemerintah dan masyarakat, kegiatan sambang kampung dan wahana pertemuan yang lain.
13. Secara internal organisasi, diperlukan strategi terhadap pelaksanaan efektivitas terhadap tugas pokok dan fungsi pegawai melalui penyelenggaraan Diklat, keterampilan aparatur terhadap penguasaan Teknologi Informasi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat, penyempurnaan SOP pelayanan yang mampu menjembatani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat, kegiatan penyegaran mental spiritual dan kegiatan gathering agar semakin kompak dan solid.
14. Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Sebagian Walikota Kepada Mantri Pamong Praja Mergangsan telah dilaksanakan dan telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi, salah satunya adalah penghapusan kewenangan yang sudah tidak relevan kembali sekaligus mengusulkan adanya pelimpahan kewenangan yang bersifat Khusus , Istimewa dan Spesifik yang menjadi potensi dari Kemantren Mergangsan seperti Kawasan Sumbu Imajiner melalui Dana Keistimewaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

J. Sumber Daya Manusia / Kepegawaian

Kemantren Mergangsan mempunyai karyawan berjumlah 53 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLOP) dari Pegawai Naban, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLOP) dari Tenaga Teknis, dan karyawan outsourcing.

Dari pegawai tersebut yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 37 orang, Pegawai Kemantren Mergangsan berjumlah 22 orang, Pegawai Kelurahan Keparakan berjumlah 5 orang, Kelurahan Wirogunan berjumlah 5 orang dan Kelurahan Brontokusuman berjumlah 5 orang.

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLOP) dari Pegawai Naban berjumlah 3 orang, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLOP) dari Tenaga Teknis 8 orang dan karyawan outsourcing 5 orang Petugas Kebersihan Se - Kemantren.

Tabel 6 Pegawai dan Karyawan Kemantren Mergangsan berdasarkan jenis jabatan, jenis kelamin dan golongan ruang

	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Mantri Pamong Praja	1	-	-	-	1	1
2	Mantri Anom	-	1	-	-	1	1
3	Jawatan Kemantren	1	4	-	5	-	5
4	Kasubag	-	2	-	2	-	2
5	Jab. Fung Umum Kec.	6	7	5	8	-	13

6	Naban Kemantren	3	-	-	-	-	3
7	Lurah	2	1	-	3		3
8	Seklur	1	2	-	3	-	3
9	Kasi Kelurahan	5	4	-	9	-	9
10	Tng Teknis Kemantren	-	3	-	-	-	3
11	Tng Teknis Kelurahan	3	2	-	-	-	5
12	Tenaga Kebersihan	5	-	-	-	-	5
Jumlah :		27	26	5	30	2	53

Tabel 7 Pegawai berdasarkan Diklat Struktural / penjenjangan bagi pejabat struktural Kemantren Mergangsan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	Diklatpim III / Spama	2	1	1
2	Diklatpim IV / Adum	15	8	7
3	Struktural yang Belum diklat penjenjangan	7	1	6
Jumlah		24	10	14

Tabel 8 Pegawai dan Karyawan Kemantren Mergangsan berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	S2	2	2	-
2	S1/ D4	21	7	14
3	D III	10	5	5
4	SLTA / SMK	4	3	1
5	SLTP	-	-	-
6	SD	-	-	-
Jumlah		37	17	20

Tabel 9 Pejabat Struktural Kemantren Mergangsan berdasarkan Jabatan Eselonisasi

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	III A	1	1	-
2	III B	1	-	1
3	IV A	8	4	4
4	IV B	14	6	8
Jumlah		24	11	13

Terkait aspek Sumber Daya Manusia atau Kepegawaian, memperhatikan analisis jabatan, beban kerja serta kebutuhan organisasi, masih membutuhkan adanya penambahan personil, terutama unsur pejabat fungsional umum untuk masing-masing seksi maupun sekretariat baik di kelurahan maupun di Kemantren.

K. Sarana dan Pra Sarana Kerja

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di Kemantren dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana prasarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran, sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih dirasakan belum memadai, hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat dan tuntutan pelayanan yang prima sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Keberadaan Gedung Kantor Kemantren Mergangsan yang baru masih membutuhkan banyak sarana dan prasarana baru untuk melengkapi dan menyempurnakan gedung kantor tersebut agar lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kemantren Mergangsan termasuk Keberadaan Fasilitas Ruang PATEN dan fasilitas ruang besar tempat rapat pertemuan warga guna mendukung Kemantren Mergangsan menuju Kemantren Inklusi.

Tabel 10 Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana Utama Kemantren Mergangsan

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Kantor Kemantren	1	Baik
2.	Pendopo Kemantren	1	Baik
3.	Rumah Dinas Mantri Pamong Praja	1	Baik
4.	Gedung Kantor Kelurahan	3	Baik
5.	Pendopo Kelurahan	3	Baik
6.	Kendaraan Dinas Roda 4	2	Baik
7.	Kendaraan Dinas Roda 3	2	Baik
8.	Kendaraan Dinas Roda 2	13	Baik
9.	Sound System	4	Baik
10.	Wireless / Sound System	5	Baik
11.	Telepon	4	Baik
12.	Telepon 3 digit	8	Baik
13.	Laptop	13	Baik
14.	Komputer	46	Baik
15.	Genset	4	Baik
17.	Ruang Rapat	5	Baik
18.	AC	17	Baik
19.	Almari Kayu	20	Baik
20.	Filling Kabinet	45	Baik

21.	Lemari Besi	13	Baik
22.	Mesin Pompa Air	4	Baik
23.	Sepeda Manual	8	Baik
24.	Mesin Gergaji	2	Baik
25.	Printer	44	Baik
26.	Mesin Presensi	1	Baik
27.	Brankas	4	Baik
28.	Papan Nama Satgas Hansip	1	Baik
29.	Papan Nama Instansi	3	Baik
30.	Running Tex	1	Baik
31.	Layar LCD	6	Baik
32.	Papan Nama KTB	2	Baik
33.	Papan Pengumuman	4	Baik
34.	Papan Titik kumpul	18	Baik
35.	Papan tulis	7	Baik
36.	Peta wilayah	1	Baik
37.	Layar OHP	1	Baik
38.	Kabel Roll	1	Baik
39.	Rambu Portabel	8	Baik
40.	Rambu Lalulintas & Rambu portable	24	Baik
41.	Meja Kerja	12	Baik
42.	kursi besi (kursi susun)	18	Baik
43.	Meja Kursi Tamu	1	Baik
44.	Meja Tulis	15	Baik
45.	Meja Kerja Biro Besar	1	Baik
46.	Meja Kerja Biro Kecil	1	Baik
47.	Meja Tik	2	Baik
48.	Meja Pelayanan	2	Baik
49.	Meja Tambahan	5	Baik
50.	Kursi rapat/sidang ukir	4	Baik
51.	Kursi Sidang/Rapat Susun	20	Baik
52.	Kursi Tangan	2	Baik
53.	kursi Komputer	1	Baik
54.	Kursi Putar	11	Baik
55.	Kursi Biasa	19	Baik
56.	Bangku Tangan	1	Baik
57.	Kursi Tunggu 4 Seat spon	3	Baik

58	Kursi Tunggu Pelayanan	2	Baik
59	Kursi Lipat	604	Baik
60	Meja Komputer	10	Baik
61	Meja Kecil/susun	2	Baik
62	Meja 1/2 Biro	49	Baik
63	Karpet Mushola	3	Baik
64	Rak Koran	3	Baik
65	Jam dinding	15	Baik
66	lemari es	1	Baik
67	Kipas Angin	30	Baik
68	Exhaust Fan	2	Baik
69	Air Purifier	5	Baik
70	Kompore Gas	1	Baik
71	Tabung Gas	2	Baik
72	Radio	3	Baik
73	televisi	6	Baik
74	Sound System	4	Baik
75	Handy Talky (HT)	10	Baik
76	Infrared Thermometer	5	Baik

L. Keuangan dan Anggaran

Anggaran untuk membiayai kinerja Kemantren Mergangsan pada Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 21 Februari 2023.

Anggaran Belanja APBD Tahun 2023 Kemantren Mergangsan total berjumlah Rp. 11.134.714.728,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan daerah, terdiri dari :

1. Retribusi makam : Rp. 34.868.000,-

b. Belanja Daerah, total berjumlah : Rp.11.134.714.728,-

Belanja Operasi yaitu : : Rp. 9.371.340.360,-

● Belanja pegawai : Rp. 5.149.077.500,-

● Belanja barang dan jasa : Rp. 4.222.262.860,-

● Belanja hibah : Rp. 0.00,-

Belanja Modal terdiri : Rp. 1.763.374.368,-

1. Belanja modal peralatan dan mesin : Rp. 75.000.000,-

2. Belanja modal gedung dan bangunan : Rp. 779.500.000,-

3. Belanja modal jalan,jaringan dan irigasi: Rp. 908.874.368,-

Tabel 11 Daftar Tujuan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 Perangkat Daerah : Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kegiatan yang Mendukung Capaian Sasaran Perangkat Daerah	Tujuan Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui Peningkatan Pembangunan Pembangunan Kemantren Mergangsan dengan Indikator Meningkatnya Nilai Evaluasi Pembangunan Pembangunan Kemantren Mergangsan dengan Nilai Minimal 400 pada Tahun 2023 dengan Pagu Anggaran APBD Tahun 2023 yaitu : Rp. 11.753.145.568,-	1.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kemantren Mergangsan dengan alokasi anggaran senilai Rp. 3.621.190.658,-dengan indikator : 1. Meningkatkan Swadaya Masyarakat, dengan strategi kebijakan : a. Meningkatkan kualitas Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa secara optimal. b. Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan secara Optimal c. Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kemantren Secara Optimal d. Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang optimal e. Terselenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kemantren dan Kelurahan secara optimal	A. Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa secara optimal melalui Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kemantren Mergangsan, dengan anggaran Rp. 23.580.000,-diperuntukkan antara lain : 1. Rapat Koordinasi Kelembagaan B. Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan secara Optimal melalui Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kemantren Mergangsan dengan alokasi anggaran Rp.3.217.123.908,- diperuntukkan antara lain : 1. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kemantren 2. Evaluasi Kelurahan 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keparakan (Pemeliharaan PJU,Pemeliharaan Balai RK dan RW, Pemeliharaan RTHP,Pemeliharaan SPAH,Pembuatan Penanda Kampung, CCTV, Pengembangan KAWasan Strategis Keparakan Kidul,Pemeliharaan Conblock) 4. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Keparakan (Pelatihan Pembuatan Jamu Tradisional,Pelatihan Batik,Pelatihan Pengolah Sampah,Pelatihan Budaya Tanaman TOGA,Pelatihan sosial MEdia Marketing Online,Pelatihan Sablon,Gebyar Lansia,Pelatihan	1. Kapasitas Pengurus RT / RW yang meningkat 2. Terpilihnya Kelurahan mewakili Kemantren Mergangsan untuk maju ke tingkat Kota YK 3. Hubungan koordinasi dan Kerjasama Forkompimka meningkat 4. Monografi Kelurahan dan Kemantren lebih akurat 5. Kemampuan marketing UMKM meningkat dan berdaya saing 6. Potensi UMKM dapat ditampilkan 7. Peningkatan kapasitas ekonomi warga miskin meningkat (pengentasan Kemiskinan) 8. Kapasitas Administrasi Kelompok Tani bertambahbaik 9. Dokumen INMEN lebih akurat 10. Dokumen Profil Kewilayahan KeMantri Pamong Praja dan Kelurahan terupdate dan lebih akuntabel 11. Pengetahuan dan kesadaran Masyarakat / pengurus Kampung akan Kebersihan dan Penghijauan Meningkat

			<p>Kel.Gandeng Gendong, Pelatihan Jemparingan, Fasilitasi Lembaga Sosial Kelurahan,Lomba Kebersihan Lingkungan,workshop Administrasi PKK,Workshop Mitra Keluarga, Gelar Potensi Budaya Kelurahan)</p> <p>5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wirogunan (Pemeliharaan SPAH,Cermin Cembung,Jalan Desa, Penataan Kawasan Wisata, Pemeliharaan Jalan Desa)</p> <p>6. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wirogunan (Pelatihan Kerajinan,Pelatihan Budidaya Pertanian Perkotaan,Pelatihan Manajemen USaha,Pelatihan Produk Boga,Pembinaan Lansia,Penanganan Sampah, Pembinaan Budaya dan Pariwisata, Wirogunan Festival)</p> <p>7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Brontokusuman(penerangan Jalan Umum,Pengadaan Meja Kursi UMKM,Pengadaan Tenda UMKM,Penataan Kawasan Wisata,Pemeliharaan Jalan Desa)</p> <p>8. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Brontokusuman(Pelatihan Pengolahan Sampah,Bimtek Pertanian Perkotaan,Pengolahan Sampah Organik, Peningkatan Kompetensi dan Ketrampilan Lembaga Sosial Masyarakat,Workshop Kelembagaan IPSM,Workshop Penguatan Kelembagaan,Bimtek Pertanian Perkotaan,Brontofest,Lomba Administrasi POSYANDU,Sosialisasi P4GN,Lomba Administrasi POSYANDU, Brontofest)</p> <p>C. Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kemantren secara optimal melalui Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kemantren Kemantren Mergangan dengan alokasi pagu anggaran Rp. 99.630.000,- untuk :</p> <p>1. Workshop Administrasi RT,RW LPMK dan Kampung</p>	<p>12. Dokumen Musrenbang KeMantri Pamong Prajaan dan Kelurahan terupdate dan lebih akuntabel</p> <p>13. Program Kegiatan PKK berjalan lancar</p> <p>14. Program Kegiatan Segoro Amarto berjalan lancar</p> <p>15. Program Kegiatan Kelembagaan Tingkat KeMantri Pamong Prajaan berjalan lancar</p> <p>16. Program Kegiatan TKPK keMantri Pamong Prajaan berjalan lancar</p> <p>17. Kesehatan, Kreatifitas Lansia meningkat</p> <p>18. Peran dan kreatifitas anak meningkat</p> <p>19. Kreatifitas Anak PAUD meningkat</p> <p>20. Kapasitas Keluarga Penyandang Disabilitas meningkat</p> <p>21. Kapasitas Kader Lembaga Sosial tentang Kesehatan meningkat</p> <p>22. Kapasitas Kader Lembaga Sosial tentang Kesehatan meningkat</p> <p>23. Kapasitas kelembagaan seni budaya Kemantren Mergangan meningkat</p> <p>24. Keterampilan dan keahlian ekonomi masyarakat miskin meningkat</p> <p>25. Pembangunan dan Pemeliharaan jalan lingkungan Kelurahan bertambah dan lebih baik</p> <p>26. Pembangunan dan Pemeliharaan fasilitas Umum Kelurahan bertambah dan lebih baik</p> <p>27. Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan fisik lebih akurat</p> <p>28. Kegiatan PKK RT/RW& kegiatan Pemberdayaan Perempuan meningkat</p> <p>29. Kesiapsiagaan warga thd bencana meningkat</p> <p>30. Keterampilan dan keahlian ekonomi masyarakat meningkat</p> <p>31. Pengetahuan tentang pentingnya Kesehatan bagi warga meningkat</p> <p>32. Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Pengurus RT/RW/Kampung/LPMK</p> <p>33. Pengetahuan Masyarakat tentangkelestarian Lingkungan Hidup meningkat</p> <p>34. Potensi masyarakat dapat ditampilkan</p> <p>35. Kapasitas LembagaMasyarakat meningkat</p> <p>36. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kelurahan bertambah baik.</p> <p>37. Pembangunan dan Pemeliharaan jalan lingkungan Kelurahan bertambah dan lebih baik</p> <p>38. Pembangunan dan Pemeliharaan fasilitas Umum Kelurahan berupa balai RW bertambah dan lebih baik</p> <p>39. Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Pengurus</p>
--	--	--	--	---

				<p>RT/RW/Kampung meningkat</p> <p>40. Pelestarian kegiatan seni budaya berkembang</p> <p>41. Keterampilan dan keahlian ekonomi masyarakat meningkat</p> <p>42. Fasilitasi kegiatan Pengurus RT/RW/Kampung meningkat</p> <p>43. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kelurahan bertambah baik</p> <p>44. Pemeliharaan PJU Lingkungan terlaksana</p> <p>45. Pengetahuan Masyarakat tentang kelestarian Lingkungan Hidup meningkat</p> <p>46. Kegiatan PKK RT/RW & kegiatan Pemberdayaan Perempuan meningkat</p> <p>47. Fasilitasi kegiatan PAUD terlaksana dan meningkat</p> <p>48. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kelurahan bertambah baik</p> <p>49. Peningkatan dan Pemeliharaan berupa SAH terlaksana</p> <p>50. Peningkatan dan Pemeliharaan berupa SAH terlaksana</p> <p>51. Peningkatan dan Pemeliharaan berupa SPAH terlaksana</p> <p>52. Potensi masyarakat dapat ditampilkan</p> <p>53. Kegiatan PKK RT/RW & kegiatan Pemberdayaan Perempuan meningkat</p> <p>54. Keterampilan dan keahlian memasak masyarakat meningkat</p> <p>55. Keterampilan keahlian ekonomi masyarakat meningkat</p> <p>56. Keterampilan keahlian ekonomi masyarakat meningkat</p> <p>57. Keterampilan keahlian ekonomi masyarakat difabel meningkat</p> <p>58. Peningkatan dan Pemeliharaan berupa Jalan Lingkungan terlaksana</p> <p>59. Pemeliharaan berupa sarana lalu lintas lingkungan terlaksana</p> <p>60. Pemeliharaan berupa sarana PJU lingkungan terlaksana</p> <p>61. Pemeliharaan berupa sarana FASUM lingkungan terlaksana</p> <p>62. Pemeliharaan berupa SAH lingkungan terlaksana</p> <p>63. Kesehatan, Kreatifitas Lansia meningkat</p> <p>64. Dukungan Sarpras PAUD bertambah dan meningkat</p> <p>65. Dukungan Sarpras Alat kesehatan bertambah dan meningkat</p> <p>66. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kelurahan bertambah baik</p> <p>67. Kreatifitas Anak PAUD meningkat</p>
--	--	--	--	---

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemilihan dan Penguahan Ketua Kampung dan LPMK 3. BIMTEK Literasi Keuangan dan digital Marketing 4. Workshop Digitalisasi Marketing berbasis Website bagi Pelaku UMKM 5. Gelar Produk UMKM dan Gapoktan 6. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat <p>A. Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang optimal melalui Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kemantren Mergangsan, dengan alokasi anggaran Rp. 12.250.000,- untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di Tingkat Desa dan Kelurahan 2. Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Keparakan 3. Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Wirogunan 4. Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Brontokusuman <p>E Terselenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kemantren dan Kelurahan secara optimal melalui Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kemantren dan Kelurahan, dengan alokasi anggaran Rp.268.606.750,-, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik 2. Festival Olahraga tradisional 3. Pentas Seni dan HUT Kota 4. Workshop PAUD 5. PELatihan Pengelolaan Sampah Organik MAndiri 6. Lomba KAmprung Hijau 7. Pengisian APAR 8. WJNC 9. Workshop Pembinaan Karakter Kepemudaan 10. Workshop Penguatan Kemantren Inklusi 11. Workshop Pembentukan Forum Anak Kemantren 	
		<p>2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran senilai Rp7.616.223.910,- dengan indikator Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan, dengan strategi kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan rapat-rapat koordinasi, konsultasi b. Menyediakan Jasa pihak ketiga, Peralatan dan perlengkapan Kantor 	<p>A. Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu melalui Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp28.096.000,- diperuntukkan bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan 2. Penyusunan Dokumen RKA SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <p>B. Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu dengan kegiatan Administrasi Keuangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kegiatan rapat koordinasi, insidental, rapat dinas, rakortas dan rapat dng masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan bertambah baik 2. Kebutuhan Alat Tulis Kantor mencukupi dan tersedia 3. Kebutuhan Komponen alat listrik tersedia 4. Pengelolaan tata naskah penatausahaan kegiatan dinas berjalan baik.

			<p>Perangkat Daerah, alokasi anggaran Rp5.438.959.000,- diperuntukkan bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6. Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran <p>C. Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu dengan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah, alokasi anggaran Rp625.000,- diperuntukkan bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD <p>D. Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu dengan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, alokasi anggaran Rp625.000,- diperuntukkan bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian <p>E. Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu dengan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, alokasi anggaran Rp472.603.110,- diperuntukkan bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>F. Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah yang selesai tepat waktu dengan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah, alokasi anggaran Rp177.239.800,- diperuntukkan untuk pembelian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Filling Kabinet 2. Meja Rapat 3. Vacuum Cleaner 4. AC 5. HP 6. Laptop 7. PC 8. Printer <p>G. Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang selesai tepat waktu dengan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran Rp783.625.000,- diperuntukkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian meterai 2. Belanja Jasa Kantor (Tagihan Telpon, Listrik, Air) 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor <p>H. Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang selesai tepat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Kebutuhan Bahan Kebersihan tersedia 6. Sarpras Genzet dan Shinzo berfungsi dan kondisi baik. 7. Sarpras APAR dapat berfungsi baik 8. Kebutuhan Bahan Komputer mencukupi 9. Kebutuhan peralatandan perlengkapan Rumah Tangga kantor tersedia dan mencukupi 10. Pembayaran Listrik, Telepon,Air dan retribusi mencukupi 11. Kebutuhan barang cetakan Kantor mencukupi dan tersedia 12. Keamanan dan ketertiban kantor terjaga : 24 Jam 365 hr 13. Kebutuhan Penggandaan mencukupi dan tersedia 14. Kebutuhan pajak STNK mobil dan motor dinas mencukupi 15. Pembayaran sewa sound system mencukupi 16. Peralatan kerja dan perlengkapan kantor berfungsi baik 17. Kebutuhan Barang Sarana Kantor meningkat, tersedia cukup 18. Kebersihan Kantor keMantri Pamong Prajaan dandkelurahan terjaga 19. Gedung Bangunan Kantor Kemantren Mergangsan,, Rumah Dinas dan Kelurahan, terpelihara baik 20. Mobil Dinas, Motor Dinas Roda 3 dan 2 terpelihara dan berfungsi baik 21. Dokumen Perencanaan, Pengendalian Penganggaran (Renja, Renstra, PK, RKA, DPA) terlaksana dibuat dengan baik dan tepat waktu 22. Dokumen Perencanaan, Pengendalian Penganggaran (Renja, Renstra, PK, RKA, DPA) terlaksana dibuat dengan baik dan tepat waktu 23. Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Fisik dan Keuangan, SKM,SPIP, Dokumen lainnya) terlaksana dibuat dengan baik dan tepat waktu 24. Dokumen Perencanaan, Pengendalian Penganggaran (Renja, Renstra, PK, RKA, DPA) terlaksana dibuat dengan baik dan tepat waktu 25. Lporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Fisik dan Keuangan, SKM,SPIP, Dokumen lainnya) terlaksana dibuat dengan baik dan tepat waktu
--	--	--	--	---

			<p>waktu dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran:Rp714.451.000,- diperuntukkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan Mebel 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 	
		<p>3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kemantren Mergangsan dengan alokasi anggaran senilai Rp. 262.735.000,- dengan indikator Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Mergangsan dengan strategi kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang koordinatif dan sesuai kebutuhan b. Terselenggaranya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat secara optimal 	<p>A. Terselenggaranya pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang koordinatif dan sesuai kebutuhan dengan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, alokasi anggaran: Rp166.625.000,- diperuntukkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Makam TPU Sasanalaya 2. Honorarium Tim money Pembangunan Wilayah 3. Jasa Tenaga Kebersihan TPU Sasonoloyo 4. Pemeliharaan Tanda Block Makam <p>B. Terselenggaranya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat secara optimal dengan kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, alokasi anggaran: Rp96.110.000, diperuntukkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cetak Formulir TPU 2. Workshop Website Inovasi MISS JUM 3. Cetak booklet leaflet 4. Survey Kepuasan Masyarakat 5. Jasa Tenaga Administrasi 6. Paket Data Pelayanan <p>C. dan Prasarana Aparatur melalui : Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Bangunan Kantor dengan pagu anggaran Rp. 472.671.677,- untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor, Taman kantor, Rumah Dinas dan Balai RK : 6 gedung <p>D. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui : Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas Operasional dengan anggaran Rp. 119.979.500,- untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Rutin kendaran Mobil Dinas, Kendaran Dinas Roda 3 dan roda 2 sejumlah 17 unit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional Pelayanan Terpadu KeMantri Pamong Prajaan (PATEN) berjalan dng Layanan Publik yang lebih baik dan meningkat

		<p>4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan pagu anggaran Rp. 64.042.000,- dengan indikator Menurunnya Pelanggaran Perda di Kemantren Mergangsan dengan strategi kebijakan:</p> <p>a. Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan target</p>	<p>A. Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan target melalui kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan anggaran Rp 64.042.000,- diperuntukkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Peraturan terkait Penegakan Perda 2. Pendataan PKL 3. Koordinasi Penanganan Permasalahan Ketertiban 4. Pembekalan Linmas menghadapi Pemilu 5. Operasi Ketertiban dan Keamanan Masyarakat 6. Sosialisasi Peraturan Terkait Penegakan Perda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas Anggota Linmas yang meningkat 2. Kesadaran Bela Negara pemuda meningkat 3. Penataan PKL dan Juru Parkir dalam dukungan Kawasan Pedestrian 4. Penataan PKL dan Juru Parkir dalam dukungan Kawasan Pedestrian Jl. Jend.Sudirman 5. Keamanan dan ketertiban kampung meningkat, pelanggaran Perda menurun 6. Perayaan Kegamaan, Lebaran, Pelaksanaan Kegiatan Liburan berjalan lancar 7. 8. 9.
		<p>5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan pagu anggaran Rp. 88.954.000,- dengan indikator Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Mergangsan dengan strategi kebijakan:</p> <p>b. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Secara Optimal</p>	<p>A. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Secara Optimal melalui kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Rp 88.954.000,- diperuntukkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Tanggap Bencana 2. Pelatihan Kesamaptaan 3. Bimtek Berbangsan dan Bernegara 4. Rakot Kelembagaan 5. Monitoring Poskamling 6. Forum Koordinasi Pembinaan PKL Periodik 7. Fasilitasi untuk Forkopimka dan HUT KEMerdekaan RI 8. Penyediaan Jasa Administrasi 	
		<p>6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,- dengan indikator Meningkatnya Swadaya masyarakat Kemantren Mergangsan secara optimal dengan strategi kebijakan:</p> <p>a. Terselenggaranya adat, seni, tradisi dan lembaga budaya secara optimal</p>	<p>B. Terselenggaranya adat, seni, tradisi dan lembaga budaya secara optimal melalui kegiatan adat, seni, tradisi dan lembaga budaya dengan alokasi anggaran Rp 100.000.000,- diperuntukkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop Memori Mergangsan 2. Gelar Budaya dan Ketoprak 3. Mergangsan Memori Living Tour 4. Tour De Mergangsan 	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Kemantren Mergangsan memberikan dukungan terkait dengan Pengarus Utamaan Gender yang menyasar 5 kelompok rentan, yaitu: fakir miskin, disabilitas, anak, perempuan dan/atau lansia yakni :

1. Fakir miskin

- Workshop Parenting Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kelurahan Keparakan
- FGD Penanganan PMKS Kelurahan Wirogunan

2. Disabilitas

- Workshop Penguatan Kemantren Inklusi

3. Anak

- Workshop Pembentukan Forum Anak Kemantren
- Pelatihan konten kreator bagi kelompok remaja kelurahan wirogunan
- Workshop pendidikan berkarakter melalui PAAR kelurahan Wirogunan
- Gebyar PAUD Kelurahan Wirogunan
- Pelatihan Kader untuk penanggulangan stunting kelurahan wirogunan
- Workshop Kelurahan Ramah Anak

4. Perempuan

- Workshop PAUD Holistik Integratif berkualitas

5. Lansia

- Gebyar Lansia Kelurahan Keparakan
- Pembinaan Lansia Kelurahan Wirogunan
- Rapat Koordinasi Lansia Kelurahan Brontokusuman

Pada Oktober 2023, Anggaran Belanja Kemantren Mergangsan mengalami proses Perubahan APBD didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 19 Oktober 2023. Anggaran Kemantren mergangsan Tahun 2023 menjadi berjumlah Rp. 11.753.145.568,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan daerah, terdiri dari :

Retribusi makam : Rp. 60.000.000,-

b. Belanja Daerah, total berjumlah : Rp. 11.753.145.568,-

Belanja Operasi yaitu : Rp. 11.132.563.153,-

- Belanja pegawai : Rp. 5.422.609.000,-
- Belanja barang dan jasa : Rp. 5.114.795.870,-
- Belanja hibah : Rp. 595.158.283,-

Belanja Modal terdiri : Rp. 620.582.415,-

- Belanja modal peralatan dan mesin : Rp. 305.909.800,-
- Belanja modal gedung dan bangunan : Rp. 240.113.670,-
- Belanja modal jalan,jaringan dan irigasi : Rp. 74.558.945,-

M. Prestasi, Penghargaan dan Inovasi

Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta bersama warga masyarakat pada Tahun 2023 mendapatkan sejumlah Apresiasi atas Prestasi dan penghargaan dalam pelaksanaan tugasnya antara lain :

1. Penghargaan Anugerah Inovasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta kategori OPD Terinovatif

Gambar 2 Penghargaan Anugerah Inovasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta kategori OPD Terinovatif

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA
YOGYAKARTA
NOMOR : 40 TAHUN 2023
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2023

DAFTAR NAMA PEMENANG ANUGERAH INOVASI PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

A. OPD TERINOVATIF ESELON II

PEMENANG	PERANGKAT DAERAH	SKOR	HADIAH
JUARA 1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1856	Rp. 5.000.000,-
JUARA 2	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	1851	Rp. 4.500.000,-
JUARA 3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1794	Rp. 4.000.000,-

B. OPD TERINOVATIF ESELON III

PEMENANG	PERANGKAT DAERAH	SKOR	HADIAH
JUARA 1	Kemantren Jetis	1895	Rp. 5.000.000,-
JUARA 2	Kemantren Wirobrajan	1866	Rp. 4.500.000,-
JUARA 3	Kemantren Mergangsan	1861	Rp. 4.000.000,-

Gambar 3 Penghargaan Anugerah Inovasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta kategori Inovasi Terbaik

D. INOVASI TERBAIK OPD ESELON III

PEMENANG	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	SKOR	HADIAH
JUARA 1	Kemantren Mergangsan	MISS JUM PaDos DUIT Wu'Tah (Kamis Jum'at Parasdyo Dadosa Doa Usaha Ilmu dan Teman)	247,15	Rp. 5.000.000,-
JUARA 2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dodolan Kampung	245,05	Rp. 4.500.000,-
JUARA 3	Kemantren Wirobrajan	One Stop Kavling Makam	243,90	Rp. 4.000.000,-

KEPALA
BADAN TERCIPTA
PENGANTARAN
SATA TAHUN
Agus Tri Haryono, ST., MT
NIP. 197203061996031004

2. Penghargaan Lomba Pameran Living Museum Bertajuk “Babad Siti Kemantren”

Gambar 4 Sertifikat Penghargaan Lomba Pameran Living Museum Bertajuk “Babad Siti Kemantren”



3. Penghargaan untuk Bank Sampah di Kelurahan Brontokusuman antara lain :

- BS Dados Arto : juara 1 kategori BS pembina
- BS BSGH : juara 1 kategori BS inovatif
- BS Rizki Mili : juara 1 lomba yel2
- BS Kamulyan : juara harapan 1 pengolahan sampah organik, juara 3 reduksi sampah anorganik, juara harapan 2 lomba ecobrick
- BS Arto Kusumo : juara harapan 1 kategori BS reguler
- SDN Muh Karangajen, SDN Timuran, SMP Muh 9 Karangajen sebagai sekolah adiwiyata
- Ibu Bakriah Sufiatun penghargaan Koord. Kemantren Mergangsan
- BS Dados Artho, BS Mekarasri, BS Kana Mandiri sebagai BS Legend

4. Penghargaan untuk Bank Sampah di Kelurahan Wirogunan antara lain :

- Juara 2 kategori pengolahan sampah Organik : Bank sampah Rotu
- Juara 3 Lomba cerdas cermat bank sampah : Bank Sampah Anjani Asri
- Juara harapan 1 kategori pembina : Bank Sampah Anjani Asri

- Juara harapan 2 lomba Fashion show Daur ulang kain perca : Bank Sampah Margo Resik
- Juara harapan 1 lomba Yel-yel. : Bank Sampah Margo Resik
- Bank Sampah Legend. : Bank Sampah Code Asri

Gambar 5 Pemberian Penghargaan bagi Penggiat Lingkungan di Kelurahan Wirogunan





5. Penghargaan yang diterima Kelurahan Keparakan antara lain :
- Juara Harapan 2 Kampung Wisata Terbaik Tingkat Kota Yogyakarta

Gambar 6 Sertifikat Juara Harapan 2 Kampung Wisata Terbaik Tingkat Kota Yogyakarta



Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta bersama warga masyarakat pada Tahun 2023 melaksanakan berbagai inovasi kegiatan dalam pelaksanaan tugasnya antara lain :

Gambar 7 QRIS Pembayaran Makam Sasanalaya Kemantren Mergangsan



Gambar 8 Nomor Register Makam Sasanalaya Kemantren Mergangsan

NOMOR REGISTER MAKAM SASANA LAYA
KEMANTREN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA

NO: / /

ALMARHUM :

AHLI WARIS :

NO. HP :

NO. SK :

MASA BERLAKU :

Gambar 9 WEB MISS JUM PADOS DUIT WUTAH".

DUITWUTAH Beranda Berita UMKM Binaan Gallery Sponsor Hubungi Kami Kontak Kami

BANK BPD DIY

DUIT can be duit
Doa, Usaha, Ilmu, Teman

Konsultasi Online →

Konsultasi Offline →

Buat Janji Konsultasi →

Tentang Kami

N. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

Executive Summary Ringkasan Eksekutif memuat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Demikian pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

- a. Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Mergangsan.
- b. Menjelaskan Gambaran singkat organisasi, Kedudukan, Tugas pokok, fungsi, Kewenangan, Uraian ketugasan , tata kerja dan Struktur Organisasi, Isu-isu Strategis, SDM dan Kepegawaian, Sarana dan Prasarana serta Anggaran baik APBD Murni, Anggaran APBD Penyempurnaan dan APBD Perubahan, Prestasi dan Penghargaan, Inovasi dan Sistematika LKIP Kemantren Mergangsan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

(Perencanaan : Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Strategis Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2023)

- a. Pada bagian awal disajikan dasar hukum Perencanaan Kinerja OPD, gambaran singkat mengenai Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah, dan Sasaran Strategis OPD dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2023-2026.
- b. Menjelaskan korelasi Dokumen RPJMD Kota Yogyakarta dengan Dokumen Renstra Kemantren Mergangsan tahun 2023-2026.

- c. Menyajikan tentang Tujuan, sasaran OPD dalam Renstra OPD 2023-2026 beserta indikator pengukuran, formula pengukuran dan target capaian baik Renstra awal maupun perubahan target setelah Review Renstra Kemantren Mergangsan.
- d. Menyajikan Strategi dan Arah kebijakan beserta indikator pengukuran dan target capaian Kemantren Mergangsan dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi baik Renstra awal maupun perubahan target setelah Review Renstra Kemantren Mergangsan..
- e. Menyajikan Program dan Kegiatan Kemantren Mergangsan Tahun 2023.
- f. Menyajikan Perjanjian Kinerja (PK) dan Perjanjian Kinerja (PK) Strategis Kemantren Mergangsan tahun 2023 yang merupakan Dokumen berisikan sasaran strategis yang harus dicapai dengan alat ukur indikator yang jelas dan target capaian yang telah ditetapkan melalui program strategis yang harus dilaksanakan oleh Kemantren Mergangsan pada tahun 2023. (Masing-masing pada APBD Murni pada awal bulan Januari 2023 dan APBD Perubahan pada Bulan Oktober 2023).
- g. Menyajikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Kemantren Mergangsan berupa ringkasan dokumen anggaran berbasis kinerja yang memuat output kinerja Kemantren Mergangsan yang merupakan Penjabaran dari Dokumen APBD Kota Yogyakarta tahun 2023.
- h. Menyajikan Perbandingan dan Persentase Target Belanja operasi dan Belanja modal Kemantren Mergangsan berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2023.
- i. Menyajikan Perbandingan dan Persentase Alokasi Belanja Langsung pada masing-masing Sasaran Strategis Utama (Program Utama) dan Sasaran Pendukung (Program Pendukung).

- a. Pada awal bagian ini disajikan uraian tata cara mekanisme pengukuran Capaian kinerja, Mekanisme Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Mekanisme Analisis keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja .
- b. Menyajikan Pengukuran Target dan Capaian Kinerja Kemantren Mergangsan meliputi :
 - Target dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun 2023
 - Target dan Capaian Kinerja Program Strategis tahun 2023
 - Target dan Capaian Kinerja Kegiatan Strategis tahun 2023
 - Target dan Capaian Kinerja Program dan kegiatan pendukung
- c. Menyajikan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2023 melalui analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, kemudian menyimpulkan keberhasilan/kegagalan capaian kinerja melalui analisis faktor-faktor peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dan analisis program/kegiatan yang menunjang, permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil meliputi :
 - Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun 2023
 - Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Program Strategis tahun 2023
 - Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Strategis tahun 2023
 - Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Program dan kegiatan pendukung tahun 2023

- d. Menyajikan Realisasi Belanja Langsung Anggaran Tahun 2023 berupa Rencana Belanja dan Realisasi belanja tahun 2023 yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.
- e. Menyajikan Analisis Efisiensi.
- f. Menyajikan Inovasi Kemantren Mergangsan Tahun 2023. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV

PENUTUP

(Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut)

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang Pencapaian OPD terhadap Sasaran Strategis yang telah ditetapkan berdasarkan pada Indikator sasaran Strategis.

Menyajikan secara singkat faktor keberhasilan/kegagalan.

Menyajikan permasalahan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis.

Memuat Rencana Tindak Lanjut dan Upaya yang akan dilakukan dalam perbaikan Kinerja Instansi di masa yang akan datang.

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Sasaran Strategis

Bab II memuat:

- A. Perencanaan Sasaran Strategis
- B. Perjanjian Kinerja
- Rencana Kerja
- Rencana Anggaran

Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

RPD Kota Yogyakarta merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. RPD Kota Yogyakarta merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPD Kota Yogyakarta menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD. RPD Kota Yogyakarta berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan RPD DIY.

Dalam RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 termuat juga Rencana Pembangunan Kemantren Mergangsan Tahun 2023-2026.

Pada Tahun 2023, Kemantren Mergangsan melaksanakan Review Rencana Strategis (Review Renstra) bersama BAPPEDA Kota Yogyakarta terkait Perubahan Target untuk Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kemantren Mergangsan dengan Indikator Jumlah Pelanggaran Perda, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Angka Swadaya Masyarakat, Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan dengan Indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Inspektorat

Tabel 12 Sasaran Program dan Target Tahunan Hasil Reviu Renstra Kemantren Mergangsan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan			
		2023	2024	2025	2026
Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kemantren Mergangsan	Jumlah Pelanggaran Perda	40	40	40	40
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat	1.591.231.000	1.593.231.000	1.596.231.000	1.598.231.000

Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan dengan Indikator Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Inspektorat	31,97	31,98	31,99	32
--	---	-------	-------	-------	----

A. 1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025 adalah :

Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi sebagai penekanan harapan menjadi suatu ideal kota di masa depan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. **Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas** adalah:
 - a. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan pendidikan yang layak dan memadai bagi aktifitas warga.
 - b. Pelayanan pendidikan yang terus meningkat melampaui standar pelayanan minimal.
2. **Kota Yogyakarta sebagai kota Kota Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang berwawasan Lingkungan** adalah:
 - a. Maju dan berkembangnya Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan, pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang unggul baik secara komparatif maupun kompetitif.
 - b. Terbangunnya sistem pelayanan dan kelembagaan yang mudah, cepat, dan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya investasi yang memberikan manfaat bagi pembangunan kota dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Meningkatnya aktivitas sektor swasta pariwisata dan pendidikan sebagai penopang utama pelayanan jasa kota secara kompetitif dan sebagai gerbong utama pertumbuhan perekonomian kota dan mampu menarik picu pergerakan sektor andalan lain.
 - d. Meningkatkan perbaikan efisiensi dan efektifitas sistem produksi dan distribusi sebagai pelayanan skala lingkungan kota dan regional.
 - e. Menguatnya kualitas identitas kota yang mampu menjadikan diri sebagai basis kota dalam kerjasama dan pengembangan usaha serta menjadi bagian sistem pergerakan antar kota.

Upaya untuk mewujudkan visi “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan” dirumuskan melalui **9 (sembilan) Misi Pembangunan** yaitu:

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

Berdasarkan rumusan **visi** dan **misi** pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 maka ditetapkan **tujuan dan sasaran** yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2023-2026 sebagai berikut :

Tabel 13 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Yogyakarta 2023-2026
(Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2023-2026)

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	
Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan	1. Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan	
	2. Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan	1. Meningkatnya Kualitas Pariwisata	1. Meningkatnya Kualitas Pariwisata	
	3. Mewujudkan Daya Saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam Pelayanan Jasa	4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang	1. Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
				2. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat
		1. Meningkatnya Kesesuaian	1. Meningkatnya Kesesuaian	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
	nyaman dan ramah lingkungan	Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang
		2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya	1. Terwujudnya karakter masyarakat berdaya yang bermoral dan beretika dengan menerapkan nilai-nilai luhur dalam bermasyarakat	1. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
	6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum	1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta	1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
	7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai	1. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
	8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas	1. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
	9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka **Kemantren Mergangsan** sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta berperan dan mendukung pencapaian **9 Misi daerah** yaitu:

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

Yang dijabarkan **dalam 11 sasaran daerah** yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

A. 2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2023 - 2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Definisi tujuan sesuai Permendagri No.86 Tahun 2017 adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan.

Tujuan

Mengacu Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Rencana Pembangunan Daerah Kemantren Mergangsan selama 4 tahun Anggaran dalam Dokumen Renstra Kemantren Mergangsan 2023-2026 adalah :

1. Meningkatnya reformasi birokrasi Kemantren Mergangsan dengan indikator Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat.
2. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

Sasaran Perangkat Daerah

Sebagai unsur Pelaksana Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan kewilayahan, mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, di dalam Renstra Kemantren Mergangsan 2013 - 2026 telah ditetapkan target Sasaran Strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan Kemantren Mergangsan sebagai berikut :

Tabel 14 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis serta target capaian dalam Renstra (Jangka Menengah 2023-2026) Kemantren Mergangsan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan	Meningkatnya reformasi birokrasi Kemantren Mergangsan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	50	52	55	60
2.	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	400	400,67	402	403

Untuk mengetahui angka kuantitatif dari sasaran **“Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan”**, digunakan formula rumus pengukuran indikator sasaran sebagai berikut :

“ Jumlah total penjumlahan nilai perkembangan pembangunan 3 (tiga) Kelurahan di Kemantren Mergangsan di bagi dengan jumlah kelurahan yang ada (tiga) ”.

Adapun nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan didapatkan dari pelaksanaan evaluasi Pembangunan Kelurahan yang dituangkan dalam Keputusan

Mantri Pamong Praja Mergangsan dengan mempertimbangkan aspek-aspek Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang telah dilaksanakan di masing-masing Kelurahan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

A. 3 Strategi, Arah kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh Pemerintah Daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2023 – 2026, maka Kemantren Mergangsan mengampu Misi 5, yakni Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya. Untuk itu dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Misi 5: Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya

Tabel 15 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 untuk Kemantren Mergangsan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan karakter masyarakat tangguh yang bermoral dan beretika dengan menerapkan nilai-nilai luhur dalam bermasyarakat	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Mergangsan	Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan
			Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate
		Menurunkan Pelanggaran Perda di Kemantren Mergangsan	Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda
		Meningkatkan Swadaya masyarakat Kemantren Mergangsan	Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri
			Menyusun Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu
			Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan
			Meningkatkan kapasitas UMKM
			Meningkatkan kapasitas Gapoktan
			Meningkatkan kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau
Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberdayaan			

			Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat
			Meningkatkan kapasitas keluarga terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam
			Meningkatkan pemanfaatan Sarana Prasarana yang terbangun dan / atau terpelihara
			Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdayaan kelurahan
			Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM
			Melaksanakan operasi PPKM
		Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah
			Meningkatkan lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat

Sedangkan Sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2023 – 2026, maka Kemantren Mergangsan mengampu Misi 5, yakni Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya. Untuk itu dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 16 Strategi dan indikator keberhasilan serta target capaian dalam RPD Kota Yogyakarta untuk Kemantren Mergangsan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke			
				2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Karakter Masyarakat Berdaya yang Bermoral dan Beretika dengan Menerapkan Nilai-Nilai Luhur dalam Bermasyarakat	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan	65 pelanggaran	65 pelanggaran	65 pelanggaran	65 pelanggaran
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	1.221.000.000 Rupiah	1.465.200.000 Rupiah	1.611.720.000 Rupiah	1.772.892.000 Rupiah
			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	400,67	402	403	404
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan	85.5 poin	86 poin	86.5 poin	87 poin
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Persentase permasalahan Kemantren	100%	100%	100%	100%

		PEMERINTAHAN UMUM	Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai

Untuk melaksanakan strategi yang telah dituangkan dalam arah kebijakan serta dalam mencapai sasaran strategis Organisasi, Kemantren Mergangsan melaksanakan lima (5) Program dan sembilan (9) kegiatan yaitu :

1. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan** terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kemantren Mergangsan** dengan Indikator program yaitu **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan** yang terdiri **dua (2) kegiatan** yaitu :

a. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** dengan Indikator program yaitu **Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan** dan **Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan** yang terdiri **lima (5) kegiatan** yaitu :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

e. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

4. **Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum** dengan Indikator program yaitu **Jumlah Pelanggaran Perda** yang terdiri **satu (1) kegiatan** yaitu :

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

5. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** dengan Indikator Program yaitu **Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi**, yang terdiri **satu (1) kegiatan** yaitu :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen/kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja (PK) Kemantren Mergangsan tahun 2023 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran secara kualitatif dan kuantitatif yang harus dicapai oleh Kemantren Mergangsan pada tahun 2023 sekaligus menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi terhadap dukungan pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta.

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Kemantren Mergangsan tahun 2023 berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 dan mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan DPA SKPD. Perjanjian Kinerja (PK) dan Kemantren Mergangsan tahun 2023 telah ditetapkan pada Januari 2023 seperti dalam tabel berikut :

Tabel 17 Perjanjian Kinerja terkait Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2023 (APBD Murni)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formula Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja 2023
1.	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan	400,67 poin
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	-	A Nilai

1. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan anggaran Murni sebesar **Rp 4.061.016.368,-**
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan anggaran murni sebesar **Rp 144.249.500,-**
3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan anggaran murni sebesar **Rp 52.126.250,-**
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran murni sebesar **Rp 72.808.000,-**
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan anggaran murni sebesar **Rp 100.000.000,-**

Dalam melaksanakan APBD Murni Tahun 2023, Dokumen Perjanjian Kinerja Kemantren Mergangsan telah merumuskan dan menetapkan Program dan output Kegiatan Strategis yang diampu Kemantren Mergangsan. Adapun Perjanjian Kinerja terkait Program dan output Kegiatan Strategis, Capaian Target Program Kemantren Mergangsan termasuk Parameter Indikator dan Formula untuk mengukurnya sebagai berikut :

Tabel 18 Perjanjian Kinerja terkait Program dan Kegiatan Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2023 (APBD Murni)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Program	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja 2022	Target Anggaran Rp
1.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan = Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	Rp.1.591.231.000,-	Rp4.061.016.368,-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	85.5 poin	Rp144.249.500,-
3	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan =Jumlah Pelanggaran Perda	65	Rp52.126.250,-
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan	100%	Rp72.808.000,-
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A	Rp6.704.514.610,-

Dalam melaksanakan APBD Murni Tahun 2023, Dokumen Perjanjian Kinerja Kemantren Mergangsan telah merumuskan dan menetapkan Program dan Output Kegiatan yang diampu Kemantren Mergangsan.

Tabel 19 Perjanjian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2023 (APBD Murni)

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1.	Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Mergangsan	Nilai survei kepuasan masyarakat	85,50
2.	Menurunnya Pelanggaran Perda di Kemantren Mergangsan.	Jumlah Pelanggaran Perda	65
3.	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Permasalahan Kemantren Mergangsan	100%

		terselesaikan sebagai hasil koordinasi	
4.	Meningkatnya Swadaya masyarakat Kemantren Mergangsan.	Angka Swadaya Masyarakat	Rp 1.221.000.000

Pada bulan Oktober Tahun 2023, Kemantren Mergangsan melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Kota untuk rasionalisasi anggaran pada Perubahan Anggaran APBD. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Kemantren Mergangsan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 20 Perjanjian Kinerja terkait Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2023 (APBD Perubahan)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formula Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja 2023
1.	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan	400,67 poin
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat		A

Tabel 21 Perubahan Perjanjian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1.	Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Mergangsan	Nilai Survey kepuasan masyarakat	85,50
2.	Menurunnya Pelanggaran Perda di Kemantren Mergangsan.	Jumlah Pelanggaran Perda	65
3.	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100%
4.	Swadaya masyarakat Kemantren Mergangsan meningkat	Angka Swadaya Murni	Rp 1.591.231.000

Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kemantren Mergangsan, Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja tidak ada perubahan, sedangkan untuk Target Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat berubah dari Rp 1.221.000.000 menjadi Rp 1.591.231.000. Volume Anggaran Kemantren Mergangsan juga bertambah sebesar Rp 1.761.222.793,-

Tabel 22 Perubahan Perjanjian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2023

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp. 100.000.000	Dana Keistimewaan – Perubahan 2023
1.1	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Rp. 100.000.000	Dana Keistimewaan – Perubahan 2023
1.1.1	Sub kegiatan Gelar Budaya Jogja	Rp. 100.000.000	Dana Keistimewaan – Perubahan 2023
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 262.735.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
2.1	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rp. 166.625.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
2.1.1	Sub kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Rp. 166.625.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
2.2	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Rp. 96.110.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
2.2.1	Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan perizinan Non Usaha	Rp. 2.405.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
2.2.2	Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Rp. 93.705.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
3	Pogram Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 3.621.190.658	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 23.580.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
3.1.1	Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 23.580.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp. 3.217.123.908	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
3.2.1	Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp. 49.410.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
3.2.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Rp. 2.530.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
3.2.3	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keparakan	Rp. 632.114.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
3.2.4	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Keparakan	Rp. 535.633.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
3.2.5	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wirogunan	Rp. 527.329.408	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
3.2.6	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wirogunan	Rp. 757.285.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
3.2.7	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Brontokusuman	Rp. 135.078.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

3.2.8	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Brontokusuman	Rp. 577.744.500	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
3.3	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp. 99.630.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
3.3.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 55.409.500	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
3.3.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp. 44.220.500	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
3.4	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Rp. 12.250.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
3.4.1	Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Rp. 690.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
3.4.2	Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Keparakan	Rp. 6.010.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
3.4.3	Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Wirogunan	Rp. 3.480.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
3.4.4	Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Brontokusuman	Rp. 2.070.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
3.5	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 268.606.750	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
3.5.1	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Rp. 12.335.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

3.5.2	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	Rp. 129.348.500	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
3.5.3	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Rp. 65.594.250	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
3.5.4	Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Rp. 5.850.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
3.5.5	Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Rp. 55.479.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 64.042.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 64.042.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
4.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp. 64.042.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 88.954.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 88.954.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultansi) Wawasan	Rp. 33.382.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
5.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp. 55.572.000	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

C. Rencana Anggaran Tahun 2023

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis sebagai penghubung antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Anggaran Murni Kemantren Mergangsan pada Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 12 Tahun 2022, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun 2023. Struktur Anggaran Belanja Tahun 2023 terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Kemantren Mergangsan melaksanakan kegiatan Tahun 2023 dengan Anggaran Murni sebesar Rp 11.134.714.728 dengan rincian Belanja Operasi Rp 9.371.340.360 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 5.149.077.500 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 4.222.262.860 dan Belanja Modal Rp 1.763.374.368. Target Pendapatan Kemantren Mergangsan yang berupa Retribusi Makam Tahun 2023 sebesar Rp 34.868.000.

Tabel 23 Target Belanja Kemantren Mergangsan APBD Murni Tahun 2023

Uraian		Target (Rp)	Prosentase
Belanja Operasi		Rp 9.371.340.360	84,16%
	Belanja Pegawai	Rp 5.149.077.500	
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.222.262.860	
Belanja Modal		Rp 1.763.374.368	15,84%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 75.000.000	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 779.500.000	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 908.874.368	
	Total	Rp 11.134.714.728	100%

Tabel 24 Target Pendapatan Kemantren Mergangsan APBD Murni Tahun 2023

Uraian		Target (Rp)	Prosentase
Pendapatan Daerah		Rp 34.868.000	
	Retribusi Daerah	Rp 34.868.000	
	Total	Rp 34.868.000	100%

Dalam Anggaran Murni 2023 Kemantren Mergangsan mempunyai 6 Program dan 17 kegiatan. Adapun 6 Program tersebut terdiri dari Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan 1 kegiatan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 7 kegiatan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 2 kegiatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan 5 kegiatan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 1 kegiatan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan 1 kegiatan.

Pada Oktober 2023, Anggaran Belanja Kemantren Mergangsan mengalami Proses Perubahan APBD didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 25 Target Belanja Kemantren Mergangsan APBD Perubahan Tahun 2023

Uraian		Target (Rp)	Prosentase
Belanja Operasi		Rp 11.132.563.153	94,72%
	Belanja Pegawai	Rp 5.422.609.000	
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 5.114.795.870	
	Belanja Hibah	Rp 595.158.283	
Belanja Modal		Rp 620.582.415	5,28%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 305.909.800	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 240.113.670	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 74.558.945	
	Total	Rp 11.753.145.568	100%

Tabel 26 Target Pendapatan Kemantren Mergangsan APBD Perubahan Tahun 2023

Uraian		Target (Rp)	Prosentase
Pendapatan Daerah		Rp 60.000.000	
	Retribusi Daerah	Rp 60.000.000	
	Total	Rp 60.000.000	100%

Anggaran Perubahan Kemantren Mergangsan Tahun 2023 diperuntukkan untuk mendukung 6 Program, 18 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Adapun 6 Program tersebut terdiri dari Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan 1 kegiatan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 8 kegiatan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 2 kegiatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan 5 kegiatan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 1 kegiatan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan 1 kegiatan.

Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Anggaran Perubahan Belanja Tahun 2023 Kemantren Mergangsan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 27 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis Utama dan Pendukung

No.	Sasaran	Anggaran Rp	Prosentase	Ket
1	2	3	4	5
A.	Sasaran Strategis Utama / Program Utama : 1 Program terdiri 6 Kegiatan			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN di Kemantren : 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan 4. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 6. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3.621.190.658,-	30,81 %	
B.	Sasaran Pendukung / Program Pendukung : 3 Program terdiri 11 Kegiatan			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	262.735.000,-	2,24 %	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	64.042.000,-	0,54 %	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	88.954.000,-	0,76 %	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,-	0,85 %	

	1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.616.223.910,-	64,80 %	
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	JUMLAH	11.753.145.568,-	100 %	

Alokasi Anggaran strategis digunakan untuk membiayai 4 program yang ada di Kemantren Mergangsan yaitu :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang diampu oleh Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan dan Kelurahan Wirogunan, Jawatan Sosial, Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Praja.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang diampu oleh Jawatan Umum dan Jawatan Kemakmuran.
3. Program Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum yang diampu oleh Jawatan Keamanan.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum diampu oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja.

Selain program strategis, ada juga Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang diampu oleh Jawatan Sosial dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diampu oleh Sekretariat.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Bab III Berisi :

A. Capaian Kinerja

B. Evaluasi dan

Analisis Capaian

Kinerja :

- Sasaran Strategis

- Program Strategis

- Kegiatan Strategis

- Program Kegiatan

Pendukung Realisasi

Anggaran Analisa

Efisiensi Inovasi

Kolaborasi lintas sektor

Kemantren Mergangsan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kemantren Mergangsan tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam mengadakan Pengukuran Kinerja Instansi berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan menggunakan perbandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja Mergangsan.

Dalam laporan ini juga disajikan Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja lainnya yaitu pada capaian target Program dan Kegiatan serta Anggaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023.

A. 1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023 (Sasaran)

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Mantri Pamong Praja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah ditetapkan sasaran strategis Kemantren Mergangsan adalah “Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan Meningkatkan” dengan indikator Nilai Evaluasi perkembangan Kemantren Mergangsan sebagai berikut :

Tabel 28 Target Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2023 (RPD Kota Yogyakarta untuk Kemantren Mergangsan Tahun 2023 - 2026)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formula Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja 2023
1.	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan	Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan	400,67 poin
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai

Dan pada RPD Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 termuat sasaran program untuk Kemantren Mergangsan sebagai berikut :

Tabel 29 Perjanjian Kinerja terkait Program dan Kegiatan Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Program	Formula Indikator Program	Target Capaian Knerja 2023	Target Anggaran Rp
1.	Meningkatkan Swadaya masyarakat Kemantren Mergangsan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan = Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	Rp.1.591.231.000,-	Rp3.621.190.658,-
2	Meningkatkan Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Mergangsan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	85.5 poin	Rp262.735.000,-
3	Menurunkan Pelanggaran Perda di Kemantren Mergangsan	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan = Jumlah Pelanggaran Perda	65	Rp64.042.000,-
4	Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan	100%	Rp88.954.000,-

Berdasarkan Berita Acara Pemingkatan Perlombaan Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang dituangkan dalam Keputusan Mantri Pamong Praja Mergangsan Nomor : 020 / KEP / MG /II/ 2023 Tanggal : 15 Februari 2023 tentang Penetapan Kelurahan Terbaik Dalam Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023 didapati pencapaian nilai untuk tiga Kelurahan di Kemantren Mergangsan sebagai berikut :

Tabel 30 Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023

NO	KELURAHAN	NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
1	Keparakan	401	Cepat Berkembang	Terbaik III
2	Brontokusuman	401	Cepat Berkembang	Terbaik II
3	Wirogunan	402	Cepat Berkembang	Terbaik I
Nilai Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan		1.204	Nilai Rata-Rata	401,33

Capaian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2023 terhadap tujuan dan sasaran strategis Kemantren Mergangsan yang telah ditetapkan dengan target dan capaian realisasi indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dirinci sebagai berikut:

Tabel 31 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	poin	400,67	401,33	100,16 %
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	A	A	100%

Dari tabel di atas, Pencapaian sasaran strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2023 yaitu Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan dan Sasaran Strategis Meningkatkan Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan dengan indikator kinerja Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat telah memenuhi target atau sebesar 100,16 % dan 100 % dari target indikator yang ditetapkan.

Keberhasilan ini kedepan tentunya menjadi pemicu semangat Kemantren Mergangsan dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya yaitu menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan, agar sasaran strategis di tahun depan dapat tercapai dan melebihi target. Pencapaian tersebut juga disebabkan partisipasi aktif warga masyarakat Kemantren Mergangsan dalam kegiatan pembangunan kewilayahan baik fisik dan non fisik sangat tinggi dan terus meningkat.

A. 2 Capaian Kinerja Program Utama Tahun 2023 (Strategi)

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Kemantren Mergangsan bahwa dalam melaksanakan sasaran strategis organisasi telah disusun strategi dan arah kebijakan berupa program dan kegiatan utama guna mencapai tercapainya nilai perkembangan pembangunan yang meningkat. Adapun strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemantren Mergangsan yaitu :

Tabel 32 Target Program Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2023 (Renstra Kemantren Mergangsan Tahun 2023 - 2026)

No.	Program	Indikator Program	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja 2023	Target Anggaran Rp
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	Angka swadaya murni	1.591.231.000	3.621.190.658
		Nilai tingkat perkembangan pembangunan Kemantren	Jumlah evaluasi Kelurahan dibagi jumlah Kelurahan	400,67	

Pengukuran kinerja terhadap Program Utama yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kemantren Mergangsan tahun 2023 dilaksanakan pada Indikator Kinerja program yaitu : **Nilai tingkat perkembangan pembangunan Kemantren dan Angka Swadaya Masyarakat**. Adapun hasil Pengukuran Capaian kinerja program yang dilakukan terhadap 2 (dua) indikator keberhasilan sebagai berikut :

- a. Nilai tingkat perkembangan pembangunan Kemantren pada tahun 2023 Kemantren Mergangsan telah melaksanakan evaluasi Kelurahan di tiga Kelurahan dan mendapatkan angka : 401,33.
- b. Angka atau Jumlah Swadaya Murni Masyarakat, bersumber dari Laporan Bulanan Lurah dan LPMK tahun 2023 dan metadata indikator program perangkat daerah tahun 2023 (data terlampir), angka swadaya murni masyarakat tahun 2023 sejumlah : Rp. 1.673.571.000,00 atau dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Swadaya Masyarakat Keparakan	: Rp.	272.080.000,-
Jumlah Swadaya Masyarakat Wirogunan	: Rp.	732.776.000,-
Jumlah Swadaya Masyarakat Brontokusuman	: Rp.	668.715.000,-

Capaian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2023 terhadap strategi atau program Kemantren Mergangsan yang telah ditetapkan dengan target dan capaian realisasi indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dirinci sebagai berikut:

Tabel 33 Capaian Kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2023

No.	Program	Indikator Program	Target Kinerja	Realisasi	Persentase
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Nilai tingkat perkembangan pembangunan Kemantren	400,67	401,33	100,16 %
		Persentase Swadaya masyarakat mjd Angka Jumlah Swadaya Murni	1.591.231.000,00	1.800.226.000,00	113,13%
		Anggaran (Rp)	3.621.190.658,00	3.602.808.513,00	99,49 %

Dari tabel di atas, Pencapaian Program strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2023 yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kemantren Mergangsan dengan indikator :

- a. Nilai tingkat perkembangan pembangunan Kemantren yang meningkat telah memenuhi target atau sebesar 100,16% dari target indikator yang ditetapkan.
- b. Angka Swadaya Murni Masyarakat telah memenuhi target atau sebesar 113,13% dari target indikator yang ditetapkan.

Nilai target Indikator tersebut juga telah disesuaikan dengan hasil Review Renstra Kemantren Mergangsan pada tanggal 22 Februari 2023, dengan realisasi pelaksanaan anggaran sejumlah Rp. 3.602.808.513,00 atau senilai 99,49% dari target untuk program strategis Kemantren Mergangsan pada tahun 2023.

A. 3 Capaian Kinerja Kegiatan utama Tahun 2023 (Arah Kebijakan)

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam **arah kebijakan**. Arah kebijakan dituangkan dalam **bentuk kegiatan** yang memiliki indikator keberhasilan berupa **output kegiatan** baik berupa secara **fisik kegiatan** maupun **keuangan**. Kegiatan Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari program strategis Perangkat daerah. Adapun strategi arah kebijakan (kegiatan) strategis yang ditetapkan dalam Renstra Kemantren Mergangsan tahun 2023-2026 untuk tahun 2023 beserta indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Target Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2023
(Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)

Arah kebijakan/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Fisik (kegiatan)	Target Kinerja Keuangan (rupiah)
1	2	3	4	5
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. capaian pelaksanaan fisik kegiatan	Kegiatan / Sub kegiatan	2 sub kegiatan	3.148.996.763
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
1. Subkeg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2. capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	rupiah		1.283.549.425
• Keparakan			14 unit	622.410.300
• Wirogunan			4 unit	526.703.125
• Brontokusuman			2 unit	134.436.000
2. Subkeg. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
• Keparakan	15 pokmas	535.632.000		
• Wirogunan	15 pokmas	752.090.000		
• Brontokusuman	15 pokmas	577.725.338		

Capaian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2023 terhadap arah kebijakan atau kegiatan utama Kemantren Mergangsan yang telah ditetapkan dengan target dan capaian realisasi indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dirinci sebagai berikut:

Tabel 35 Capaian Kinerja Kegiatan Utama per Program Kemantren Mergangsan Tahun 2023
(Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)

Arah kebijakan/ Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Fisik (keg.)	Capaian Kinerja Fisik (keg.)	Persen Fisik (%)	Target Kinerja Keuangan (rupiah)	Realisasi Kinerja Keuangan	Persen Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
• Subkeg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.294.521.408	1.283.549.425	99,15
• Keparakan	14 unit	14 unit	100	632.114.000	622.410.300	98,46
• Wirogunan	4 kegiatan	4 kegiatan	100	527.329.408	526.703.125	99,88
• Brontokusuman	2 unit	2 unit	100	135.078.000	134.436.000	99,52
• Subkeg. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.870.662.500	1.865.447.338	99,72
• Keparakan	15 pokmas	15 pokmas	100	535.633.000	535.632.000	100
• Wirogunan	15 pokmas	15 pokmas	100	757.285.000	752.090.000	99,31
• Brontokusuman	15 pokmas	15 pokmas	100	577.744.500	577.725.338	100
TOTAL				3.165.183.908	3.148.996.763	99,49

Berdasarkan tabel di atas, dalam melaksanakan satu (1) program utama yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kemantren Mergangsan terdapat 2 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp3.165.183.908,00.

Capaian Kinerja kegiatan utama secara fisik kegiatan telah dilaksanakan sesuai target sejumlah 100 %. Capaian Kinerja Kegiatan utama secara keuangan mencapai 99,49 % dari target yang ditetapkan. Pencapaian Kinerja kegiatan tersebut diikuti dengan realisasi pelaksanaan anggaran senilai Rp3.148.996.763,00.

Capaian Kinerja Kegiatan Program Utama yang tertinggi terdapat pada tiga (3) sub kegiatan Sub keg. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan, Sub keg. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Brontokusuman engan tingkat ketercapaian realisasi keuangan 100 %

Sementara Capaian Kinerja Program Utama yang mengalami capaian yang terendah adalah Sub keg. Pembangunan Sarana dan Pra Sarana Kelurahan Keparakan. Target keuangan Rp 632.114.000,00 tercapai sejumlah Rp 622.410.300,00 atau 98,46 %, sedangkan realisasi fisik sub kegiatan tersebut terlaksana 100% dari target.

A. 4 Capaian Kinerja Tahun 2023 (Program dan Kegiatan Pendukung)

Kemantren Mergangsan merencanakan sejumlah program dan kegiatan pendukung guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Sasaran Strategis. Adapun program dan kegiatan pendukung yang ditetapkan dalam Renstra Kemantren Mergangsan tahun 2023 -2026 untuk tahun 2023 beserta indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 36 Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Kemantren Mergangsan Tahun 2023 (Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)

Arah kebijakan/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Fisik (keg.)	Target Kinerja Keuangan (rupiah)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1. capaian pelaksanaan fisik kegiatan 2. capaian pelaksanaan keuangan kegiatan			
A. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				
Gelar Budaya Jogja			1 laporan	100.000.0000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 dokumen	10.525.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD			1 dokumen	1.200.000

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 dokumen	1.200.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		4 dokumen	6.525.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD		1 dokumen	1.200.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 laporan	5.050.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 laporan	2.396.000
B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		35 orang	5.422.609.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 dokumen	13.850.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 dokumen	625.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 dokumen	250.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan	875.000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		2 dokumen	250.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		4 laporan	250.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 dokumen	250.000
C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 laporan	625.000
D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		12 dokumen	625.000
E. Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4 paket	34.619.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4 paket	262.378.110
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4 paket	25.505.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200 laporan	155.090.000
F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		37 unit	177.239.800
G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6 laporan	3.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3 laporan	110.325.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 laporan	670.300.000
H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		17 unit	151.668.000
Pemeliharaan Mebel		88 unit	39.200.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2 jenis	14.100.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5 unit	432.533.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		134 unit	76.950.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
A. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		3 dokumen	166.625.000
B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		1 dokumen	2.405.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		1 laporan	93.705.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2 laporan	23.580.000
B. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		297 lembaga kemasyarakatan	49.410.000
Evaluasi Kelurahan		3 laporan	2.530.000
C. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		297 lembaga	55.409.500

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		7 laporan	44.220.500
D. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			
Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		1 dokumen	690000
E. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		25 keluarga	12.335.000
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		410 keluarga	129.348.500
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		10956 keluarga	65.594.250
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		68 keluarga	5.850.000
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		150 keluarga	55.479.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
A. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan			
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		1 laporan	64.042.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		60 orang	33.382.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		3 dokumen	55.572.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan		1 dokumen	6.010.000

Kegiatan Masyarakat (PPKM) Keparakan				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Wirogunan		1 dokumen		3.480.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Brontokusuman		1 dokumen		2.070.000

Capaian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2023 terhadap program dan kegiatan pendukung Kemantren Mergangsan yang telah ditetapkan dengan target dan capaian realisasi indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dirinci sebagai berikut:

Tabel 37 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Kemantren Mergangsan Tahun 2023
(Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)

Arah Kebijakan/ Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Fisik (subkeg)	Capaian Kegiatan (subkeg)	Persen Fisik (%)	Target Kinerja Keuangan (Rupiah)	Realisasi Kinerja Keuangan	Persen Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						
A. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100,000,000	98,950,000	98.95
Gelar Budaya Jogja	1 laporan	1 laporan	100	100,000,000	98,950,000	98.95
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7,621,213,410	7,299,237,383	95.78
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100	28,096,000	27,956,500	99.50
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	10,525,000	10,511,500	99.87
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1,200,000	1,158,000	96.5
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100	1,200,000	1,160,000	96.67
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	4 dokumen	4 dokumen	100	6,525,000	6,497,000	99.57
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1,200,000	1,193,000	99.42
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	100	5,050,000	5,044,000	99.88
B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	100	2,396,000	2,393,000	99.87
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5,438,959,000	5,151,618,579	94.72
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35 orang	35 orang	100	5,422,609,000	5,135,291,079	94.7
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100	13,850,000	13,829,000	99.85
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100	625,000	625,000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100	250,000	250,000	100
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 laporan	1 laporan	100	875,000	875,000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	250,000	250,000	100
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 laporan	4 laporan	100	250,000	249,000	99.6
C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	250,000	249,500	99.8
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				625,000	624,500	99.92
D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	100	625,000	624,500	99.92
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				625,000	625,000	100
E. Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100	625,000	625,000	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				477,592,610	472,006,562	98.83
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 paket	4 paket	100	34,619,500	34,363,600	99.26
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 paket	4 paket	100	262,378,110	257,131,162	99.9
	4 paket	4 paket	100	25,505,000	25,504,800	100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	200 laporan	100	155,090,000	155,007,000	99.95
F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				177,239,800	176,136,800	99.38
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37 unit	37 unit	100	177,239,800	176,136,800	99.38
G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				783,625,000	783,062,724	99.93
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 laporan	6 laporan	100	3,000,000	3,000,000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 laporan	3 laporan	100	110,325,000	110,310,724	99.99
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100	670,300,000	669,752,000	99.92
H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				714,451,000	687,206,718	96.19
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17 unit	17 unit	100	151,668,000.00	126,932,318	83.69
Pemeliharaan Mebel	88 unit	88 unit	100	39,200,000	39,200,000	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 jenis	2 jenis	100	14,100,000	14,100,000	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 unit	5 unit	100	432,533,000	430,164,400	99.45
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134 unit	134 unit	100	76,950,000	76,810,000	99.82
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				262,735,000	262,404,996	99.87
A. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				166,625,000	166,359,496	99.84
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3 dokumen	3 dokumen	100	166,625,000	166,359,496	99.84
B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				96,110,000	96,045,500	99.93
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1 dokumen	1 dokumen	100	2,405,000	2,405,000	100
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2 laporan	2 laporan	100	93,705,000	93,640,500	99.93
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				444,446,750	442,923,250	99.66
A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				23,580,000	23,574,000	99.97
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	2 laporan	100	23,580,000	23,574,000	99.97
B. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				51,940,000	51,892,000	99.91
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	297 lembaga kemasyarakatan	297 lembaga kemasyarakatan	100	49,410,000	49,362,000	99.9
Evaluasi Kelurahan	3 laporan	3 laporan	100	2,530,000	2,530,000	100
C. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				99,630,000	99,607,000	99.98
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	297 lembaga	297 lembaga	100	55,409,500	55,409,500	100
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7 laporan	7 laporan	100	44,220,500	44,197,500	99.95

D. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				690,000	690,000	100
Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	100	690,000	690,000	100
E. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				268,606,750	267,160,250	99.46
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	25 keluarga	25 keluarga	100	12,335,000	12,335,000	100
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	410 keluarga	410 keluarga	100	129,348,500	128,148,500	99.07
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10956 keluarga	10956 keluarga	100	65,594,250	65,347,750	99.62
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	68 keluarga	68 keluarga	100	5,850,000	5,850,000	100
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	150 keluarga	150 keluarga	100	55,479,000	55,479,000	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				64,042,000	64,042,000	100
A. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				64,042,000	64,042,000	100
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	1 laporan	100	64,042,000	64,042,000	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				88,954,000	88,954,000	100
A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				88,954,000	88,954,000	100
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 orang	60 orang	100	33,382,000	33,382,000	100
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 dokumen	3 dokumen	100	55,572,000	55,572,000	100

Berdasarkan tabel di atas, Kemantren Mergangsan melaksanakan program pendukung internal yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 kegiatan dengan output kegiatan fisik berjumlah 30 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 7.616.223.910,-. Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai 95.78% dari target yang ditetapkan.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pendukung dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik secara keuangan mencapai 99,87 % dari target yang ditetapkan. Pencapaian Kinerja kegiatan tersebut senilai Rp262.404.996,- dari target anggaran senilai Rp262.735.000,-. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pendukung dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mencapai 99,66% dari target yang ditetapkan. Pencapaian Kinerja kegiatan tersebut senilai Rp442.923.250,- dari target anggaran senilai Rp444.446.750,-. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pendukung dari Program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum secara keuangan mencapai 100 % dari target yang ditetapkan. Pencapaian Kinerja kegiatan tersebut senilai Rp64.042.000,- dari target anggaran senilai Rp64.042.000,-. Capaian Kinerja Program dan

Kegiatan pendukung dari Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Pencapaian Kinerja Kegiatan tersebut senilai Rp88.954.000,- dari target anggaran Rp88.954.000

Adapun Capaian Kinerja program dan kegiatan pendukung secara fisik semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai target sejumlah 100 %.

Capaian Kinerja program dan kegiatan pendukung yang tertinggi terdapat pada beberapa sub kegiatan, yakni :

1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD,
2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD,
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,
4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan,
5. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian,
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
8. Pemeliharaan Mebel,
9. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha,
11. Evaluasi Kelurahan,
12. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan,
13. Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan,
14. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga,
15. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam,
16. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas,
17. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia,
18. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional,
19. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan,
20. Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan,

Sub Kegiatan diatas mencapai nilai realisasi 100 %. Secara fisik dan keuangan dua puluh (20) sub kegiatan tersebut juga telah dilaksanakan sesuai target yakni 100 %.

Sementara Capaian Kinerja Program Pendukung yang mengalami capaian yang terendah adalah sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target keuangan Rp 151.668.000,- tercapai sejumlah Rp126.932.318,- atau 83.69 %, sedangkan realisasi

fisik sub kegiatan yang terlaksana tetap 100% dari target. Kinerja keuangan sub kegiatan ini tidak maksimal dikarenakan ada beberapa ASN menggunakan kendaraan pribadi selain itu ada beberapa kendaraan tidak menukarkan nota pembelian BBM sebab lupa tidak di print out, salah nopol dan lain-lain.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja dilakukan guna mengetahui sejauh mana keberhasilan dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah, berbagai faktor-faktor keberhasilan/ kegagalan pencapaian Kinerja Perangkat Daerah, permasalahan dan rekomendasi solusi/Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian masalah untuk peningkatan pencapaian kinerja Perangkat Daerah di masa yang akan datang.

Evaluasi Capaian Kinerja dilakukan dengan pengukuran kinerja Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana tingkatan keberhasilan dan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah dalam pencapaian kinerja yaitu dengan menggunakan skala nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

*Tabel 38 Skala Nilai Peringkat Kinerja dalam Pengukuran Kinerja Perangkat daerah
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sedangkan Analisis Capaian Kinerja dilakukan dengan melakukan analisa dari berbagai aspek sudut pandang capaian kinerja untuk mengetahui faktor sebab akibat, faktor keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan rekomendasi solusi/Rencana Tindak Lanjut penyelesaian masalah untuk peningkatan pencapaian kinerja Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Analisa Capaian Kinerja dapat dilakukan dengan berbagai metode antara lain :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan.
2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA.
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun berjalan dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisa faktor-faktor penghambat dan pendorong peningkatan/penurunan kinerja

Adapun tahap selanjutnya adalah Penyampaian Keberhasilan Pencapaian Kinerja dapat dilakukan dengan melakukan :

1. Analisa penyebab keberhasilan pencapaian sasaran
2. Analisa sebab/faktor/program /kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan
3. Analisa permasalahan dan solusi/Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian masalah

Dalam sub bab ini akan disajikan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis antara lain pada:

1. **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis**
2. **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Program Strategis,**
3. **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Kegiatan Strategis,**

B. 1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis (Sasaran)

Capaian sasaran strategis dicerminkan dalam capaian Indikator kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2023 dan Renstra Kemantren Mergangsan tahun 2023-2026 telah ditetapkan sasaran strategis Kemantren Mergangsan adalah “Meningkatnya tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan” dengan indikator kinerja nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan dan “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan” dengan indikator kinerja Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat. Sasaran Strategis, Indikator dan Target Capaian Kinerja 2023 Kemantren Mergangsan dapat digambarkan sebagai berikut:

*Tabel 39 Target Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2023
(Renstra Kemantren Mergangsan Tahun 2023-2026)*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formula Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja 2023
1.	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan	400,67
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Kategori Hasil Penilaian RB oleh Inspektorat	A

Berdasarkan Berita Acara Pemingkatan Perlombaan Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang dituangkan dalam Keputusan Mantri Pamong Praja Mergangsan Nomor : 020 / KEP / MG /II/ 2023 Tanggal : 15 Februari 2023 tentang Penetapan Kelurahan Terbaik Dalam Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023 didapati pencapaian nilai untuk tiga Kelurahan di Kemantren Mergangsan sebagai berikut :

Tabel 40 Hasil Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan Tingkat Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023

NO	KELURAHAN	NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
1	Keparakan	401	Cepat Berkembang	Terbaik III
2	Brontokusuman	401	Cepat Berkembang	Terbaik II
3	Wirogunan	402	Cepat Berkembang	Terbaik I
Nilai Perkembangan KeMantri Pamong Prajaan		1.204	Nilai Rata-Rata	401,33

Capaian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2023 terhadap tujuan dan sasaran strategis Kemantren Mergangsan yang telah ditetapkan dengan target dan capaian realisasi indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dirinci sebagai berikut:

Tabel 41 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	poin	400,67	401,33	100,16%
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	A	A	100%

Tabel 42 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan tahun 2023-2026

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Uraian	Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Target	400,67	402	403	404
			Capaian	401,33	-	-	-
			%	100,16	-	-	-
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Target	A	A	A	A
			Capaian	A	-	-	-
			%	100	-	-	-

Tabel 43 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2023 terhadap Tahap Akhir Renstra

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian 2023 terhadap Target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	401,33	400,67	401,33	100,16 %	404	99,34%
2	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	100%

Dari tabel di atas, Pencapaian sasaran strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2023 telah memenuhi target masing-masing sebesar 100,16 % dan 100% dari target indikator yang ditetapkan.

Adapun Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja sasaran strategis Kemantren Mergangsan yaitu “Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan Meningkatkan” dengan indikator Nilai Evaluasi perkembangan Kemantren Mergangsan pada tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian kinerja sasaran strategis Kemantren Mergangsan tahun 2023 dengan indikator Kinerja Nilai Evaluasi perkembangan Kemantren Mergangsan sebesar 100,16% masuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik**
2. Analisis capaian Kinerja sasaran strategis Kemantren Mergangsan tahun 2023 sebagai berikut :
 - a. Capaian indikator Kinerja Nilai Evaluasi Perkembangan Kemantren Mergangsan Tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan sebesar : 100 % dari target 400,67 poin tercapai 401,33 poin.
 - b. Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Perkembangan Kemantren Mergangsan meningkat dari tahun sebelumnya sejumlah 1,00 poin dari capaian tahun lalu sebesar 400,33 poin.
 - c. Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Perkembangan Kemantren Mergangsan Tahun 2023 mencapai 99.34% dari target akhir RPD 2026.
 - d. Terdapat selisih positif antara target dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Perkembangan Kemantren Mergangsan Tahun 2023 sebesar 0,66 poin.
 - e. Selisih poin tersebut terjadi karena di masing-masing kelurahan saling membenahi diri dan meningkatkan prestasi pada sumber daya masing-masing.
3. Analisa keberhasilan/kegagalan sasaran strategis
 - a. Capaian sasaran strategis Kemantren Mergangsan yaitu “Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan Meningkatkan “dengan indikator Kinerja: Nilai Evaluasi perkembangan Kemantren Mergangsan pada tahun 2023 berhasil melebihi target, keberhasilan tersebut tercapai berkat dukungan program dan kegiatan yang ditetapkan dan dijalankan telah tepat dan selaras dengan tantangan ke depan kebutuhan anggaran akan bertambah besar.
 - b. Keberhasilan Capaian sasaran Strategis Kemantren ini mampu menjadi pemicu semangat dan kedisiplinan serta eksistensi pegawai Kemantren Mergangsan dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan dan Masyarakat, agar nilai Evaluasi perkembangan Kemantren di tahun depan dapat tercapai dan melebihi target.

- c. Pencapaian keberhasilan sasaran strategis disebabkan partisipasi aktif warga Kemantren Mergangsan yang meningkat dalam kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis Kewilayahan baik pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.

B. 2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Program Strategis

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Kemantren Mergangsan bahwa dalam melaksanakan sasaran strategis organisasi telah disusun strategi dan arah kebijakan berupa program dan kegiatan utama guna mencapai tercapainya nilai perkembangan pembangunan yang meningkat. Adapun strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemantren Mergangsan yaitu :

Tabel 44 Target Program Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2023
(APBD Perubahan Kemantren Mergangsan Tahun 2023)

No.	Program	Indikator Program	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja 2023	Target Anggaran Rp
1.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Nilai tingkat perkembangan pembangunan Kemantren	Jumlah hasil evaluasi kelurahan dibagi jumlah kelurahan	400,67	3.621.190.658
		Angka Swadaya masyarakat	Jumlah swadaya Murni masyarakat pada tiga kelurahan	1.591.231.000	

Capaian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2023 terhadap strategi atau program Kemantren Mergangsan yang telah ditetapkan dengan target dan capaian realisasi indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dirinci sebagai berikut:

Tabel 45 Capaian Kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2023

No.	Program	Indikator Program	Target Kinerja	Realisasi	Persentase
1.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Nilai tingkat perkembangan pembangunan kemantren Mergangsan	400,67	401,33	100,16%
		Angka Swadaya masyarakat	1.591.231.000	1.673.571.000	105,17%
		Anggaran (Rp)	3.621.190.658	3.602.808.513	99,49%

Tabel 46 Capaian Kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2023-2026

No	Program	Indikator	Uraian	Tahun						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai tingkat perkembangan pembangunan kemantren	Target	390	395	400	400,67	402	403	404
			Realisasi	391	395,33	400,33	401,33			
			Persentase	100,26 %	100,08 %	100,08 %	100,16 %			
		Persentase Swadaya masyarakat /	Target	45 % menjadi 1.000.000.000	46 % menjadi 1.105.000.000	47 % menjadi 1.110.000.000	1.591.231.000 Rupiah	1.465.200.000 Rupiah	1.611.720.000 Rupiah	1.772.892.000 Rupiah

		Angka Swadaya Murni	Realisasi	1.104.590.500	1.113.893.600	1.591.231.000	1.673.571.000 Rupiah			
			Persen %	110,46%	100,80%	143,35 %	100 %			

Tabel 47 Target dan Realisasi Kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2023 terhadap tahun lalu dan Akhir Renstra/RPD

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai tingkat perkembangan pembangunan kemantren	400,33 atau 100,08 %	400,67	401,33	100,16 %	404	99,34 %
2	Persentase Swadaya masyarakat / Angka Swadaya Murni	1.591.231.000 rupiah atau 100,80%	1.591.231.000 Rupiah	1.673.571.000 Rupiah	105,17 %	1.772.892.000 Rupiah	94,40 %

Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan dengan indikator Angka Swadaya masyarakat yang meningkat sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan tahun 2022 dengan indikator kinerja Persentase Swadaya masyarakat telah tercapai 105,17 % masuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik**.
2. Analisis capaian Kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan tahun 2023 dengan indikator kinerja Angka Swadaya masyarakat sebagai berikut :
 - a. Target Indikator Capaian Kinerja Program Utama indikator Angka Swadaya masyarakat Kemantren Mergangsan Tahun 2023 telah direviu pada tahun 2023. Semula dari Angka Swadaya Murni Masyarakat Kemantren Mergangsan sebesar Rp 1.221.000.000 menjadi Rp 1.591.231.000 karena tahun sebelumnya telah mencapai angka Rp 1.591.231.000.
 - b. Capaian Kinerja Program Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2022 dengan indikator kinerja Persentase Swadaya masyarakat telah memenuhi target atau sebesar 105,17 % dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
 - c. Capaian Program Utama dengan indikator kinerja Angka Swadaya masyarakat Kemantren Mergangsan Tahun 2023 lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dari 100,80% di tahun sebelumnya menjadi 105,17% di tahun 2023 ini karena perekonomian sudah mulai pulih setelah pandemi Covid 19.

B. 3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Kegiatan Strategis (Arah Kebijakan)

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam arah kebijakan. Arah kebijakan dituangkan dalam bentuk kegiatan yang memiliki indikator keberhasilan berupa output kegiatan baik berupa secara fisik kegiatan maupun keuangan.

Kegiatan Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari program strategis Perangkat daerah. Adapun strategi arah kebijakan (kegiatan) strategis yang ditetapkan dalam RPD Kota Yogyakarta untuk Kemantren Mergangsan tahun 2023 -2026 untuk tahun 2023 beserta indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Target Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2023
(Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)

Arah kebijakan/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Fisik (kegiatan)	Target Kinerja Keuangan (rupiah)
1	2	3	4	5
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. capaian pelaksanaan fisik kegiatan	Kegiatan / Sub kegiatan		3.621.190.658
1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.217.123.908
Subkeg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.294.521.408
• Keparakan	2. capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	rupiah	4 unit	632.114.000
• Wirogunan			4 unit	527.329.408
• Brontokusuman			2 unit	135.078.000
Subkeg. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.870.662.500
• Keparakan			15 pokmas	535.633.000
• Wirogunan			15 pokmas	757.285.000
• Brontokusuman			15 pokmas	577.744.500

Capaian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2023 terhadap arah kebijakan atau Kegiatan Utama Kemantren Mergangsan yang telah ditetapkan dengan target dan capaian realisasi indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dirinci sebagai berikut:

Tabel 49 Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kemantren Mergangsan Tahun 2023
(Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)

Arah kebijakan/ Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Fisik (keg.)	Capaian Kinerja Fisik (keg.)	Persen Fisik (%)	Target Kinerja Keuangan (rupiah)	Realisasi Kinerja Keuangan	Persen Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
• Subkeg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.294.521.408	1.283.549.425	99,15
• Keparakan	4 unit	4 unit	100	632.114.000	622.410.300	98,46
• Wirogunan	4 unit	4 unit	100	527.329.408	526.703.125	99,88
• Brontokusuman	2 unit	2 unit	100	135.078.000	134.436.000	99,52

• Subkeg. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.870.662.500	1.865.447.338	99,72
• Keparakan	15 pokmas	15 pokmas	100	535.633.000	535.632.000	100
• Wirogunan	15 pokmas	15 pokmas	100	757.285.000	752.090.000	99,31
• Brontokusuman	15 pokmas	15 pokmas	100	577.744.500	577.725.338	100
TOTAL				3.165.183.908	3.148.996.763	99,49

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja kegiatan strategis Kemantren Mergangsan pada Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan masing- masing diuraikan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kemantren Mergangsan tahun 2023 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah tercapai 100% masuk dalam kategori kriteria : Sangat Baik.
2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kemantren Mergangsan tahun 2023 dengan Indikator Kinerja Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan dengan target pelanggaran 65 pelanggaran, hanya ada 40 pelanggaran selama tahun 2023.
3. Analisa keberhasilan capaian Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kemantren Mergangsan sebesar 138%. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan monev wilayah rutin dengan BKO, koordinasi rutin antara Kemantren, kelurahan, dan BKO, dan juga ada tambahan staf dan BKO baru di Kemantren Mergangsan mendekati akhir tahun.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja kegiatan strategis Kemantren Mergangsan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan masing- masing diuraikan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kemantren Mergangsan tahun 2023 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah tercapai 100% masuk dalam kategori kriteria : Sangat Baik.
2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kemantren Mergangsan tahun 2023 dengan Indikator Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan dengan target 85,5 poin, tercapai 86 poin selama survey di tahun 2023.

3. Analisa keberhasilan capaian Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kemantren Mergangsan sebesar 100,58%. Hal ini dapat dicapai dengan adanya :
 - a. Pelayan online dan ADM.
 - b. Respon yang cepat terhadap kebutuhan masyarakat.
 - c. Terdapat hotline pengaduan masyarakat.
 - d. pelayanan retribusi pendapatan makam secara online/Qris
 - e. SKM dengan qris, sudah menggunakan teknologi informasi.
 - f. Optimalisasi teknologi informasi dalam pelaksanaan survey.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja kegiatan strategis Kemantren Mergangsan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Kegiatan Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan masing- masing diuraikan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kemantren Mergangsan tahun 2023 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah tercapai 100% masuk dalam kategori kriteria : Sangat Baik.
2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kemantren Mergangsan tahun 2023 dengan Indikator Kinerja Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi Kemantren Mergangsan dengan target 100%, tercapai 100%.
3. Analisa keberhasilan capaian Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kemantren Mergangsan sebesar 100% ini dapat dicapai dengan adanya :
 - a. Koordinasi dilakukan secara rutin dan tindak lanjut penanganan permasalahan dilakukan dengan responsif.
 - b. Terdapat upaya pencegahan permasalahan terutama terkait dengan keamanan Nataru dan Pemilu Tahun 2024.
 - c. Adanya koordinasi dengan pimpinan partai politik, agama dan tokoh masyarakat di Kemantren Mergangsan.
 - d. Perencanaan kegiatan dan monev dilakukan bersama dengan tokoh-tokoh forkompintren.
 - e. Koordinasi yang baik dijalin tidak hanya di level pimpinan tetapi juga di level teknis dengan memanfaatkan media formal dan informal.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya (Program dan Kegiatan Pendukung)

Tabel 50 Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Kemantren Mergangsan Tahun 2023
(Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)

Arah kebijakan/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Fisik (keg.)	Target Kinerja Keuangan (rupiah)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	capaian pelaksanaan fisik kegiatan capaian pelaksanaan keuangan kegiatan			
A. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				
Gelar Budaya Jogja			1 laporan	100.000.0000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 dokumen	10.525.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD			1 dokumen	1.200.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 dokumen	1.200.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			4 dokumen	6.525.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD			1 dokumen	1.200.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 laporan	5.050.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 laporan	2.396.000
B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			35 orang	5.422.609.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 dokumen	13.850.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 dokumen	625.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12 dokumen	250.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 laporan	875.000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			2 dokumen	250.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			4 laporan	250.000

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 dokumen	250.000
C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 laporan	625.000
D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		12 dokumen	625.000
E. Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4 paket	34.619.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4 paket	262.378.110
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4 paket	25.505.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200 laporan	155.090.000
F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		37 unit	177.239.800
G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6 laporan	3.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3 laporan	110.325.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 laporan	670.300.000
H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		17 unit	151.668.000
Pemeliharaan Mebel		88 unit	39.200.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2 jenis	14.100.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5 unit	432.533.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		134 unit	76.950.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
A. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana		3 dokumen	166.625.000

dan Prasarana Pelayanan Umum			
B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		1 dokumen	2.405.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		1 laporan	93.705.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2 laporan	23.580.000
B. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		297 lembaga kemasyarakatan	49.410.000
Evaluasi Kelurahan		3 laporan	2.530.000
C. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		297 lembaga	55.409.500
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		7 laporan	44.220.500
D. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			
Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		1 dokumen	690000
E. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		25 keluarga	12.335.000
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		410 keluarga	129.348.500
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		10956 keluarga	65.594.250
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		68 keluarga	5.850.000
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		150 keluarga	55.479.000

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
A. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan			
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		1 laporan	64.042.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		60 orang	33.382.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		3 dokumen	55.572.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Keparakan		1 dokumen	6.010.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Wirogunan		1 dokumen	3.480.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Brontokusuman		1 dokumen	2.070.000

Capaian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2023 terhadap program dan kegiatan pendukung Kemantren Mergangsan yang telah ditetapkan dengan target dan capaian realisasi indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dirinci sebagai berikut:

Tabel 51 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Kemantren Mergangsan Tahun 2023
(Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)

Arah Kebijakan/ Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Fisik (subkeg)	Capaian Kegiatan (subkeg)	Persen Fisik (%)	Target Kinerja Keuangan (Rupiah)	Realisasi Kinerja Keuangan	Persen Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				100,000,000	98,950,000	98.95
A. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100,000,000	98,950,000	98.95
Gelar Budaya Jogja	1 laporan	1 laporan	100	100,000,000	98,950,000	98.95
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7,621,213,410	7,299,237,383	95.78
A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				28,096,000	27,956,500	99.50
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100	10,525,000	10,511,500	99.87
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1,200,000	1,158,000	96.5
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1,200,000	1,160,000	96.67
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100	6,525,000	6,497,000	99.57
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1,200,000	1,193,000	99.42
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	100	5,050,000	5,044,000	99.88
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	100	2,396,000	2,393,000	99.87
B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,438,959,000	5,151,618,579	94.72
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang	35 orang	100	5,422,609,000	5,135,291,079	94.7
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100	13,850,000	13,829,000	99.85
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100	625,000	625,000	100
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100	250,000	250,000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100	875,000	875,000	100
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	2 dokumen	100	250,000	250,000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 laporan	4 laporan	100	250,000	249,000	99.6
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	100	250,000	249,500	99.8
C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				625,000	624,500	99.92
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	100	625,000	624,500	99.92
D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				625,000	625,000	100
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	100	625,000	625,000	100
E. Administrasi Umum Perangkat Daerah				477,592,610	472,006,562	98.83
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 paket	4 paket	100	34,619,500	34,363,600	99.26
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 paket	4 paket	100	262,378,110	257,131,162	99.9
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 paket	4 paket	100	25,505,000	25,504,800	100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	200 laporan	100	155,090,000	155,007,000	99.95
F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				177,239,800	176,136,800	99.38
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37 unit	37 unit	100	177,239,800	176,136,800	99.38
G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				783,625,000	783,062,724	99.93
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 laporan	6 laporan	100	3,000,000	3,000,000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 laporan	3 laporan	100	110,325,000	110,310,724	99.99
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100	670,300,000	669,752,000	99.92
H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				714,451,000	687,206,718	96.19
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17 unit	17 unit	100	151,668,000.00	126,932,318	83.69
Pemeliharaan Mebel	88 unit	88 unit	100	39,200,000	39,200,000	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 jenis	2 jenis	100	14,100,000	14,100,000	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 unit	5 unit	100	432,533,000	430,164,400	99.45
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134 unit	134 unit	100	76,950,000	76,810,000	99.82
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				262,735,000	262,404,996	99.87
A. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				166,625,000	166,359,496	99.84
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3 dokumen	3 dokumen	100	166,625,000	166,359,496	99.84
B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				96,110,000	96,045,500	99.93
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1 dokumen	1 dokumen	100	2,405,000	2,405,000	100
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2 laporan	2 laporan	100	93,705,000	93,640,500	99.93
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				444,446,750	442,923,250	99.66
A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				23,580,000	23,574,000	99.97
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	2 laporan	100	23,580,000	23,574,000	99.97
B. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				51,940,000	51,892,000	99.91
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	297 lembaga kemasyarakatan	297 lembaga kemasyarakatan	100	49,410,000	49,362,000	99.9
Evaluasi Kelurahan	3 laporan	3 laporan	100	2,530,000	2,530,000	100
C. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				99,630,000	99,607,000	99.98
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	297 lembaga	297 lembaga	100	55,409,500	55,409,500	100
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7 laporan	7 laporan	100	44,220,500	44,197,500	99.95

D. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				690,000	690,000	100
Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	100	690,000	690,000	100
E. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				268,606,750	267,160,250	99.46
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	25 keluarga	25 keluarga	100	12,335,000	12,335,000	100
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	410 keluarga	410 keluarga	100	129,348,500	128,148,500	99.07
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10956 keluarga	10956 keluarga	100	65,594,250	65,347,750	99.62
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	68 keluarga	68 keluarga	100	5,850,000	5,850,000	100
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	150 keluarga	150 keluarga	100	55,479,000	55,479,000	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				64,042,000	64,042,000	100
A. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				64,042,000	64,042,000	100
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	1 laporan	100	64,042,000	64,042,000	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				88,954,000	88,954,000	100
A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				88,954,000	88,954,000	100
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 orang	60 orang	100	33,382,000	33,382,000	100
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 dokumen	3 dokumen	100	55,572,000	55,572,000	100

Berdasarkan tabel di atas, Kemantren Mergangsan melaksanakan tiga (3) program pendukung yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 96,14%. Realisasi senilai Rp 7.793.873.105,- dari target Rp 8.106.580.174,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan capaian 98,35%. Realisasi senilai Rp 601.186.937,- dari target Rp 611.270.911,-
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan capaian 99,36%. Realisasi senilai Rp 74.227.125,- dari target Rp 74.704.000,-

Adapun Capaian Kinerja program dan kegiatan pendukung secara fisik semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai target sejumlah 100 %.

Capaian Kinerja program dan kegiatan pendukung yang tertinggi terdapat pada beberapa sub kegiatan, yakni :

1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN,
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,
3. Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan,
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat,

6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
8. Evaluasi Kelurahan,
9. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan,
10. Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan,
11. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga,
12. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam,
13. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas,
14. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia,
15. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional,
16. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan,
17. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Keparakan,
18. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Brontokusuman

Secara fisik dan keuangan delapan belas (18) sub kegiatan tersebut juga telah dilaksanakan sesuai target yakni 100 %.

Sementara Capaian Kinerja Program Pendukung yang mengalami capaian yang terendah adalah sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target keuangan Rp151.668.000,- tercapai sejumlah Rp126.932.318,- atau 83.69%, sedangkan realisasi fisik sub kegiatan yang terlaksana tetap 100% dari target. Kinerja keuangan sub kegiatan ini tidak maksimal dikarenakan ada beberapa ASN menggunakan kendaraan pribadi selain itu ada beberapa kendaraan tidak menukarkan nota pembelian BBM sebab lupa tidak di print out, salah nopol dan lain-lain.

D. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Anggaran Murni Kemantren Mergangsan pada Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun 2023. Dengan Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.12.0000/001/2023 tanggal 2 Januari 2023. Struktur Anggaran Belanja Tahun 2023 terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Kemantren Mergangsan melaksanakan kegiatan Tahun 2023 dengan Anggaran Murni sebesar Rp 11.134.714.728 dengan rincian Belanja Operasi Rp 9.371.340.360 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 5.149.077.500 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 4.222.262.860 dan Belanja Modal Rp 1.763.374.368. Target Pendapatan Kemantren Mergangsan yang berupa Retribusi Makam Tahun 2023 sebesar Rp 34.868.000.

Tabel 52 Target Belanja Kemantren Mergangsan APBD Murni Tahun 2023

Uraian		Target (Rp)	Prosentase
Belanja Operasi		Rp 9.371.340.360	84,16%
	Belanja Pegawai	Rp 5.149.077.500	
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.222.262.860	
Belanja Modal		Rp 1.763.374.368	15,84%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 75.000.000	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 779.500.000	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 908.874.368	
	Total	Rp 11.134.714.728	100%

Atau jika diuraikan sesuai dengan Programnya, maka ada enam (6) program di Kemantren Mergangsan, yakni :

Tabel 53 Target Belanja Kemantren Mergangsan APBD Murni Tahun 2023 berdasarkan Program Kegiatan

Program	Jumlah Kegiatan	Target Keuangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1	100.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8	6.704.514.610
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2	144.249.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5	4.061.016.368
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	52.126.250
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	72.808.000
TOTAL		11.134.714.728

Tabel 54 Target Pendapatan Kemantren Mergangsan APBD Murni Tahun 2023

Uraian		Target (Rp)	Prosentase
Pendapatan Daerah		Rp 34.868.000	
	Retribusi Daerah	Rp 34.868.000	
	Total	Rp 34.868.000	100%

Pada Oktober 2023, Anggaran Belanja Kemantren Mergangsan mengalami Proses Perubahan APBD didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 55 Target Belanja Kemantren Mergangsan APBD Perubahan Tahun 2023

Uraian		Target (Rp)	Prosentase
Belanja Operasi		Rp 11.132.563.153	94,72%
	Belanja Pegawai	Rp 5.422.609.000	
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 5.114.795.870	
	Belanja Hibah	Rp 595.158.283	
Belanja Modal		Rp 620.582.415	5,28%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 305.909.800	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 240.113.670	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 74.558.945	
	Total	Rp 11.753.145.568	100%

Atau jika diuraikan sesuai dengan Programnya, maka anggaran dari empat (4) program di Kemantren Mergangsan, menjadi :

Tabel 56 Target Belanja Kemantren Mergangsan APBD Perubahan Tahun 2023 berdasarkan Program Kegiatan

Program	Jumlah Kegiatan	Target Keuangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1	100.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8	7.616.223.910
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2	262.735.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5	3.621.190.658
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	64.042.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	88.954.000
TOTAL		11.753.145.568

Tabel 57 Anggaran Perubahan Tahun 2023

Uraian		Target (Rp)	Prosentase
Pendapatan Daerah		Rp 60.000.000	
	Retribusi Daerah	Rp 60.000.000	
	Total	Rp 60.000.000	100%

Tabel 58 Komposisi dan Persentase Target Belanja Langsung Kemitraan Mergangsan APBD Perubahan Tahun 2023 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Utama dan Sasaran Pendukung

No.	Sasaran	Anggaran Rp	Prosentase		Ket
1	2	3	4		5
A.	Sasaran Strategis Utama / Program Utama : 1 Program terdiri 1 Kegiatan				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN: 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.165.183.908	26,93%		
B.	Sasaran Pendukung / Program Pendukung : 5 Program terdiri 11 Kegiatan				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	262.735.000	2,24 %		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	64.042.000	0,55 %		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.616.223.910	64,80 %		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000	0,85%		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	88.954.000	0,76%		

PROGRAM MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PEMBERDAYAAN	456.006.750	3.87%		
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 5. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)					
Jumlah		11.753.145.568			

Adapun Capaian Kinerja Kegiatan utama secara keuangan mencapai 99,16 % dari target yang ditetapkan dapat dilihat dalam tabel berikut :

*Tabel 59 Capaian Kinerja Kegiatan Utama per Program Kemantren Mergangsan Tahun 2023
(Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)*

Arah kebijakan/ Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Fisik (keg.)	Capaian Kinerja Fisik (keg.)	Persen Fisik (%)	Target Kinerja Keuangan (rupiah)	Realisasi Kinerja Keuangan	Persen Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
• Subkeg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.294.521.408	1.283.549.425	99,15
• Keparakan	14 unit	14 unit	100	632.114.000	622.410.300	98,46
• Wirogunan	4 kegiatan	4 kegiatan	100	527.329.408	526.703.125	99,88
• Brontokusuman	2 unit	2 unit	100	135.078.000	134.436.000	99,52
• Subkeg. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.870.662.500	1.865.447.338	99,72
• Keparakan	15 pokmas	15 pokmas	100	535.633.000	535.632.000	100
• Wirogunan	15 pokmas	15 pokmas	100	757.285.000	752.090.000	99,31
• Brontokusuman	15 pokmas	15 pokmas	100	577.744.500	577.725.338	100
TOTAL				3.165.183.908	3.148.996.763	99,49

Tabel 60 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Kemantren Mergangsan Tahun 2023
(Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)

Arah Kebijakan/ Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Fisik (subkeg)	Capaian Kegiatan (subkeg)	Persen Fisik (%)	Target Kinerja Keuangan (Rupiah)	Realisasi Kinerja Keuangan	Persen Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				100,000,000	98,950,000	98.95
A. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100,000,000	98,950,000	98.95
Gelar Budaya Jogja	1 laporan	1 laporan	100	100,000,000	98,950,000	98.95
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7,621,213,410	7,299,237,383	95.78
A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				28,096,000	27,956,500	99.50
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100	10,525,000	10,511,500	99.87
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1,200,000	1,158,000	96.5
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1,200,000	1,160,000	96.67
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100	6,525,000	6,497,000	99.57
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1,200,000	1,193,000	99.42
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	100	5,050,000	5,044,000	99.88
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	100	2,396,000	2,393,000	99.87
B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,438,959,000	5,151,618,579	94.72
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang	35 orang	100	5,422,609,000	5,135,291,079	94.7
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100	13,850,000	13,829,000	99.85
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100	625,000	625,000	100
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100	250,000	250,000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100	875,000	875,000	100
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	2 dokumen	100	250,000	250,000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 laporan	4 laporan	100	250,000	249,000	99.6
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	100	250,000	249,500	99.8
C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				625,000	624,500	99.92
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	100	625,000	624,500	99.92
D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				625,000	625,000	100
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	100	625,000	625,000	100
E. Administrasi Umum Perangkat Daerah				477,592,610	472,006,562	98.83
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 paket	4 paket	100	34,619,500	34,363,600	99.26
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 paket	4 paket	100	262,378,110	257,131,162	99.9
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 paket	4 paket	100	25,505,000	25,504,800	100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	200 laporan	100	155,090,000	155,007,000	99.95
F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				177,239,800	176,136,800	99.38
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37 unit	37 unit	100	177,239,800	176,136,800	99.38
G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				783,625,000	783,062,724	99.93
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 laporan	6 laporan	100	3,000,000	3,000,000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 laporan	3 laporan	100	110,325,000	110,310,724	99.99
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100	670,300,000	669,752,000	99.92
H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				714,451,000	687,206,718	96.19
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17 unit	17 unit	100	151,668,000.00	126,932,318	83.69
Pemeliharaan Mebel	88 unit	88 unit	100	39,200,000	39,200,000	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 jenis	2 jenis	100	14,100,000	14,100,000	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 unit	5 unit	100	432,533,000	430,164,400	99.45
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134 unit	134 unit	100	76,950,000	76,810,000	99.82
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				262,735,000	262,404,996	99.87
A. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				166,625,000	166,359,496	99.84
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3 dokumen	3 dokumen	100	166,625,000	166,359,496	99.84
B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				96,110,000	96,045,500	99.93
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1 dokumen	1 dokumen	100	2,405,000	2,405,000	100
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2 laporan	2 laporan	100	93,705,000	93,640,500	99.93
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				444,446,750	442,923,250	99.66
A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				23,580,000	23,574,000	99.97
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	2 laporan	100	23,580,000	23,574,000	99.97
B. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				51,940,000	51,892,000	99.91
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	297 lembaga kemasyarakatan	297 lembaga kemasyarakatan	100	49,410,000	49,362,000	99.9
Evaluasi Kelurahan	3 laporan	3 laporan	100	2,530,000	2,530,000	100
C. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				99,630,000	99,607,000	99.98
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	297 lembaga	297 lembaga	100	55,409,500	55,409,500	100
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7 laporan	7 laporan	100	44,220,500	44,197,500	99.95

D. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				690,000	690,000	100
Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	100	690,000	690,000	100
E. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				268,606,750	267,160,250	99.46
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	25 keluarga	25 keluarga	100	12,335,000	12,335,000	100
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	410 keluarga	410 keluarga	100	129,348,500	128,148,500	99.07
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10956 keluarga	10956 keluarga	100	65,594,250	65,347,750	99.62
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	68 keluarga	68 keluarga	100	5,850,000	5,850,000	100
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	150 keluarga	150 keluarga	100	55,479,000	55,479,000	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				64,042,000	64,042,000	100
A. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				64,042,000	64,042,000	100
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	1 laporan	100	64,042,000	64,042,000	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				88,954,000	88,954,000	100
A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				88,954,000	88,954,000	100
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 orang	60 orang	100	33,382,000	33,382,000	100
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 dokumen	3 dokumen	100	55,572,000	55,572,000	100

Berdasarkan tabel di atas, Kemantren Mergangsan melaksanakan program pendukung internal yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 kegiatan dengan output kegiatan fisik berjumlah 30 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 7.616.223.910,-. Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai 95.78% dari target yang ditetapkan.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pendukung dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik secara keuangan mencapai 99,87 % dari target yang ditetapkan. Pencapaian Kinerja kegiatan tersebut senilai Rp 262.404.996,- dari target anggaran senilai Rp 262.735.000,-.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pendukung dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mencapai 99,49% dari target yang ditetapkan. Pencapaian Kinerja kegiatan tersebut senilai Rp 3.602.808.513,- dari target anggaran senilai Rp 3.621.190.658,-.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pendukung dari Program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum secara keuangan mencapai 100 % dari

target yang ditetapkan. Pencapaian Kinerja kegiatan tersebut senilai Rp 64.042.000,- dari target anggaran senilai Rp 64.042.000,-.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pendukung dari Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Pencapaian Kinerja Kegiatan tersebut senilai Rp 88.954.000,- dari target anggaran Rp 88.954.000.

Gambaran Keseluruhan Rencana Belanja dan Realisasi Belanja Kemantren Mergangsan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 61 Rencana Belanja dan Realisasi Belanja Kemantren Mergangsan pada tahun 2023

Program	Jumlah Kegiatan	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Prosentase
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1	100,000,000	98.950.000	98.95
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8	7.616.223.910	7.299.237.383	95.85
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2	262.735.000	262.7404.996	99.87
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5	3.621.190.658	3.602.808.513	99.49
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	64.042.000	64.042.000	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	88.954.000	88.954.000	100
JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN		11.753.145.568	11.417.156.892	97.14

Penyerapan Anggaran Belanja pada tahun 2023 senilai Rp 11.417.156.892,- atau sebesar 97,14% dari total Anggaran Belanja yang dialokasikan yaitu Rp 11.753.145.568,- Sedangkan untuk dua (2) program pendukung yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menjadi program dengan capaian terendah dengan capaian 95,85 %. Realisasi senilai Rp 7.299.237.383,- dari target Rp 7.616.223.910,-

2. Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan capaian 98,95%. Realisasi senilai Rp 98.950.000,- dari target Rp 100.000.000,-

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran telah memenuhi target dengan penyerapan anggaran maka jika dianalisa pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 20223 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 62 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	400,67	401,33	100,16	3.621.190.658	3.605.550.013	99,57
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan	85,5	86	100,58	262.735.000	262.404.996	99,87
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan	65	40	100	64.042.000	64.042.00	100
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100%	100%	100	88.954.000	88.954.000	100
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A	A	A	7.616.223.910	7.299.237.383	95,84
Jumlah Total Belanja						11.753.145.568	11.419.138.392	97,15

C. Analisa Efisiensi

Tabel 63 Analisis efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	100,16	99,49	0,67 %

(Hanya untuk indikator kinerja sasaran yang capaiannya $\geq 100\%$)

Capaian Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 telah berhasil mencapai target atau melebihi target, dengan analisa tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Sasaran Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat telah mencapai kinerja sebesar 99,49% dengan efisiensi anggaran 0,67%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui pencermatan, verifikasi, pendampingan dan pengawasan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan mulai dari, perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dalam media forum koordinasi formal maupun informal.

E. Inovasi

Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta bersama warga masyarakat pada Tahun 2023 melaksanakan berbagai inovasi kegiatan dalam pelaksanaan tugasnya antara lain :

- a. Penggunaan QRIS untuk pembayaran Retribusi Makam Sasanalaya

Gambar 10 Penggunaan QRIS untuk pembayaran Retribusi Makam Sasanalaya



- b. Pemberian stiker Nomor Register Makam Sasanalaya pada batu nisan di Makam Sasanalaya

Gambar 11 stiker Nomor Register Makam Sasanalaya pada batu nisan di Makam Sasanalaya



- c. MISS JUM PaDos DUIT WuTah (Kamis Jum'at Parasdyo Dadosa Doa Usaha Ilmu dan Teman)

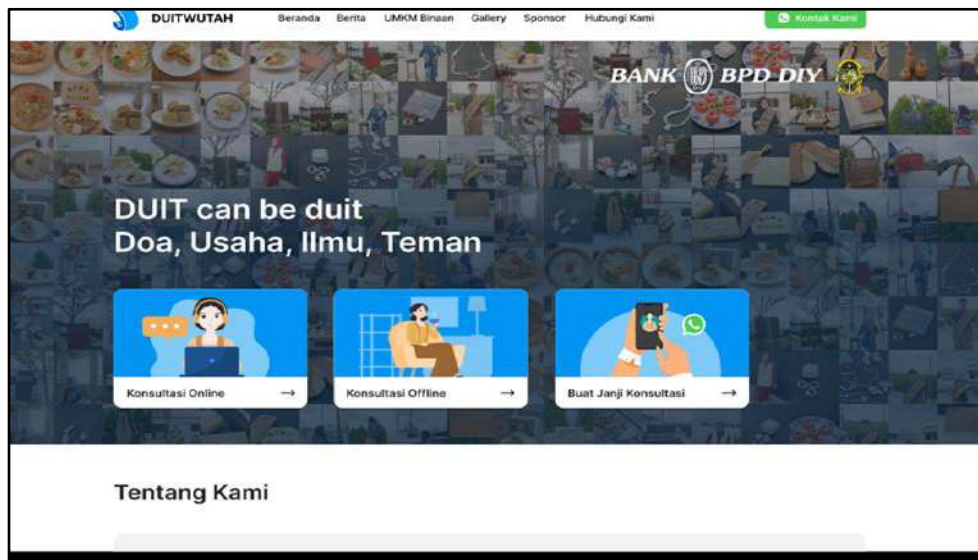
Gambar 12 Inovasi MISS JUM PaDos DUIT WuTah

D. INOVASI TERBAIK OPD ESELON III

PEMENANG	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	SKOR	HADIAH
JUARA 1	Kemantren Mergangsan	MISS JUM PaDos DUIT WuTah (Kamis Jum'at Parasdyo Dadosa Doa Usaha Ilmu dan Teman)	247,15	Rp. 5.000.000,-
JUARA 2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dodolan Kampung	245,05	Rp. 4.500.000,-
JUARA 3	Kemantren Wirobrajan	One Stop Kavling Makam	243,90	Rp. 4.000.000,-



Gambar 13 Web MISS JUM PaDos DUIT WuTah



F. Kolaborasi Lintas Sektor

TPU Sasanalaya adalah makam milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang berada di wilayah Kemantren Mergangsan. Kemantren Mergangsan mulai menata administrasi makam baik pada pembayarannya, yakni dengan QRIS yang mencotok inovasi Kemantren Wirobrajan. Inovasi ini memudahkan warga dan petugas dalam proses pembayaran retribusi makam.

Selain itu penataan administrasi juga dilakukan di makam itu sendiri dengan penempelan stiker Nomor Register Makam Sasanalaya pada batu nisan di Makam Sasanalaya. Dimana pada stiker tersebut memuat informasi nama orang yang dimakamkan, ahli waris, nomor handphone ahli waris, nomor SK pembayaran, dan berlaku sampai kapan.

Harapannya stiker tersebut dapat mempermudah pengenalan untuk petugas maupun ahli waris TPU Sasanalaya.

Gambar 14 Contoh Stiker pada Makam



Selain itu koordinasi dan monev gabungan bersama Forkopimka Mergangsan juga dapat telah dapat menyelesaikan permasalahan dengan capaian 100%.

BAB IV Penutup

Bab 5 Berisi :

Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2023 ini merupakan bentuk Laporan Pertanggungjawaban Kemantren Mergangsan dalam Penyelenggaraan kegiatan dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2023 ini juga pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Strategis Kemantren Mergangsan Tahun 2023-2026 juga sebagai media evaluasi Kemantren Mergangsan dalam meningkatkan capaian kinerja pada tahun mendatang. Laporan Akuntabilitas menggambarkan Capaian Kinerja Kemantren Mergangsan dalam melaksanakan target-target sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Program dan kegiatan tersebut dicapai dikarenakan adanya dukungan partisipasi masyarakat dan inovasi yang dilaksanakan oleh Kemantren Mergangsan tahun 2023. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat dipertahankan serta inovasi dapat ditingkatkan.

Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai diperlukan solusi untuk mencapai raih target-target tersebut di tahun depan. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sasaran strategis Kemantren Mergangsan telah ditetapkan dalam Renstra Kemantren Mergangsan tahun 2023-2026 yaitu Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat dengan indikator kinerja nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan dengan indikator Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat.
2. Capaian Kinerja Kemantren Mergangsan terhadap sasaran strategis berdasarkan pengukuran kinerja melalui indikator yang ditetapkan telah mencapai 100.16 % dari target yang telah ditetapkan.
3. Berdasarkan Evaluasi dan Analisis terhadap capaian kinerja Sasaran strategis tahun 2023, Kemantren Mergangsan dikategorikan berhasil atau sangat tinggi dalam capaian kinerja tahun 2023.

Dari analisis capaian kinerja strategis adanya permasalahan di belanja langsung kelurahan khususnya pekerjaan pembangunan wilayah yang semula pekerjaan fisik merupakan belanja modal berubah menjadi belanja hibah. Terkait hal tersebut saran dan masukan yg dpt dilakukan untuk mengatasi sebagai berikut:

1. Pencermatan dan cek lokasi usulan belanja hibah baik pekerjaan pembangunan wilayah maupun belanja modal pemberdayaan masyarakat
2. Melibatkan LPMK dalam monitoring dan evaluasi dalam proses pelaksanaan hibah

3. Menyatukan persepsi antara pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pemangku kebijakan dengan kemantren dan tokoh masyarakat di wilayah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan wilayah dan lebih terstruktur.

LAMPIRAN



- Lampiran 1. Cascading/Pohon Kinerja
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja (PK) dan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023
- Lampiran 3. Pengukuran Kinerja PD : Kemantren Mergangsan Tahun 2023
- Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKIP Tahun Sebelumnya
- Lampiran 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2023
- Lampiran 6. Berita Acara Review Renstra Kemantren Mergangsan 2023-2026
- Lampiran 7. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Renja Kec Mergangsan Tahun 2023
- Lampiran 8. Evaluasi terhadap Hasil Renja TW I s.d TW IV Tahun 2023
- Lampiran 9. Hasil Monitoring SPIP Kemantren Mergangsan Tahun 2023
- Lampiran 10. Manajemen Risiko Tahun 2023
- Lampiran 11. Penghargaan dan Inovasi Kemantren Mergangsan Tahun 2023
- Lampiran 12. Ringkasan APBD Murni Kemantren Mergangsan Tahun 2023
- Lampiran 13. Ringkasan APBD Penyempurnaan III Kemantren Mergangsan Tahun 2023
- Lampiran 14. Ringkasan APBD Perubahan Kemantren Mergangsan Tahun 2023
- Lampiran 14. Dokumen Target Rencana dan Realisasi Belanja per TW Kec Mergangsan Tahun 2023
- Lampiran 16. Dokumen Pendukung Keuangan KeMantri Pamong Prajaan Mergangsan Tahun 2023
- Lampiran 17. Struktur Organisasi dan Daftar Nominatif Pegawai Kemantren Mergangsan Tahun 2023
- Lampiran 18. Daftar Rekapitulasi Barang Inventaris Kec. Mergangsan Tahun 2023
- Lampiran 19. Daftar Rekapitulasi Barang Persediaan Kec. Mergangsan Tahun 2023
- Lampiran 20. Laporan Hasil Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kemantren Mergangsan 2023
- Lampiran 21. Dokumen IKM /SKM Kemantren Mergangsan Tahun 2023
- Lampiran 21. Metadata Indikator Sasaran Strategis dan Program Strategis Tahun 2023
- Lampiran 23. Dokumen Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023
- Lampiran 24. Pelaporan Penilaian Kinerja ASN
- Lampiran 25. Laporan Evaluasi Kemantren Mergangsan Tahun 2023



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN MERGANGSAN

ꦏꦶꦲꦠꦺꦤ꧀ꦩꦺꦫꦁꦱꦤ꧀

Jl. Sisingamangaraja No. 55 Yogyakarta Kode Pos: 55153 Telp.(0274) 388943

Fax (0274) 388943 EMAIL : mg@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

**TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKIP TAHUN SEBELUMNYA
KEMANTREN MERGANGSAN**

No	Saran/Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak lanjut	Tindak Lanjut
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja sasaran pada level individu (menyusun dan mengesahkan SKP individu untuk seluruh pegawai tepat waktu)	Penyusunan SKP sesuai format terbaru dan tepat waktu	Menyesuaikan SKP sesuai format terbaru dan menyusunnya tepat waktu
2.	Menyesuaikan format pengukuran kinerja eselon IV/sub-Koordinator yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022	Melakukan Penyusunan pengukuran kinerja eselon IV/sub-Koordinator yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022	Menyusun pengukuran kinerja eselon IV/sub-Koordinator yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022
3.	Terus meningkatkan penggunaan pelaporan kinerja berkala untuk perbaikan aktivitas dan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja.	Rapat Evaluasi capaian Kinerja bulanan, dan per triwulan	Melakukan Rapat Evaluasi capaian Kinerja bulanan, dan per triwulan

Mantri Pamong Praja

